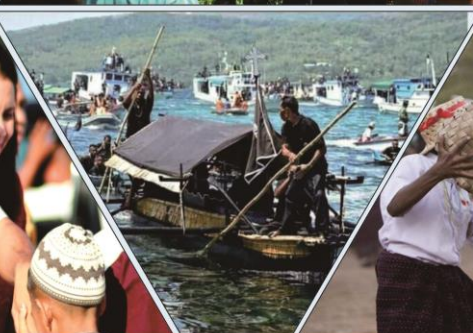




LKIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR



Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governancedan Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, 29 Maret 2021

BUPATI FLORES TIMUR,



PANTONIUS ROBERTUS GEGE HADJON, ST



Sebagai unsur penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas Birokrasi Publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan riil masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah pelayan publik atau *public server* harus bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2020 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020. LKIP ini merupakan representasi dari hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini, karena OPD yang dibentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam bentuk program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja 2020. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKIP ini mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dan

upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Upaya-upaya atau *effort* yang dilakukan dalam pencapaian kinerja untuk mewujudkan dan mencapai sasaran pembangunan pada masing-masing Bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan secara *powerfull* dengan tingkat pencapaian yang bervariasi. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki tergolong berhasil.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

NO	MISI	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	SKALA ORDINAL
Misi I : Selamatkan Orang Muda Flores Timur Terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 37 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	4,00	Kurang
2.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	115,00	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan	100,00	Baik
4.	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	124,38	Baik Sekali
5.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	79,72	Baik
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Atas Kesejahteraan Sosial	51,20	Kurang
7.	Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	70,05	Cukup
Rata-rata Misi I		77,76	Baik
Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur Terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 17 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Kinerja Transportasi	26,42	Kurang
2.	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	104,15	Baik Sekali
3.	Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	100,00	Baik
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	116,20	Baik Sekali
5.	Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman	94,50	Baik
6.	Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota	100,00	Baik
Rata-rata Misi II		90,21	Baik

Misi III : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur. Terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	83,16	Baik
2.	Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	100,00	Baik
Rata- rata Misi III		91,58	Baik
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur Terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	100,00	Baik
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	52,93	Kurang
Rata-rata Misi IV		76,46	Baik
Misi V : Reformasi Birokrasi Terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88,61	Baik
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	101,81	Baik Sekali
Rata rata Misi V		95,21	Baik
Rata-rata Misi I – V		89,73	Baik

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020 mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun ketiga periode Pembangunan Lima Tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi tahapan yang baik untuk RPJMD tahap berikutnya demi terciptanya pembangunan yang diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	16
1.4 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi Tahun 2017-2022	22
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	40
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	49
3.2 Analisis Capaian	52
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	101
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran Tindak Lanjut	103
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	106
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2020	107
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	111
4. Rencana Kinerja Tahunan 2021 Kabupaten Flores Timur	110
5. SOP Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur	147

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur	2
1.2 Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2015 – 2019	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	3
1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2020	4
1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	5
1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2019	6
1.5 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019	7
1.6 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019	8
1.7 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2019	10
1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	15
1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020	15
1.10 Data Jabatan Sturktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong	16
2.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur	37
2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	42
3.1 Skala Pengukuran Ordinal	50
3.2 Pencapaian Indikator Sasaran	51
3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	51
3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kemandirian Orang Muda	53
3.5 Program Pendukung dan Anggaran 2020 Sasaran 1	54
3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	55
3.7 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 2	56
3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan	56
3.9 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 3	58
3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	58
3.11 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 4	62
3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	63
3.13 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2020	66
3.14 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 5	67
3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial	68
3.16 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 6	69

3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	70
3.18	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 7	71
3.19	Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan Kinerja Transportasi	71
3.20	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2020 Sasaran 8	73
3.21	Analisis Pencapaian Sasaran 9 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	73
3.22	Program Pendukung dan Anggaran 2020 Sasaran 9	75
3.23	Analisis Pencapaian Sasaran 10 Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	76
3.24	Program Pendukung dan Anggaran 2020 Sasaran 10	77
3.25	Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	77
3.26	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 11	79
3.27	Analisis Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman	80
3.28	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 12	81
3.29	Analisis Pencapaian Sasaran 13 Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	82
3.30	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 13	83
3.31	Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	83
3.32	Program Pendukung dan Anggaran 2020 Sasaran 14	87
3.33	Analisis Pencapaian Sasaran 15 Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	88
3.34	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2020 Sasaran 15	88
3.35	Analisis Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	89
3.36	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2020 Sasaran 16	90
3.37	Analisis Pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya Produksi Perikanan	90
3.38	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2020 Sasaran 17	92
3.39	Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92
3.40	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2020 Sasaran 18	98
3.41	Analisis Pencapaian Sasaran 19 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	99
3.42	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2020 Sasaran 19	100
3.43	Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2020	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

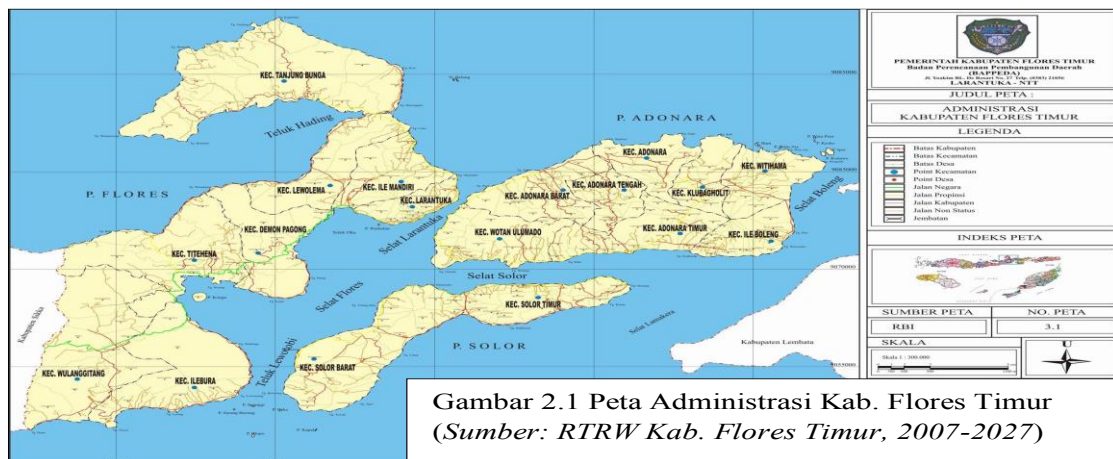
1.2.1 Kondisi Geografi

Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08° 40'LS dan 122°38'-123°57'BT. Dengan luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah), dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur



Topografi Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan 12 %, ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Tingkat Kondisi wilayah geografis yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung yaitu gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan, gunung Leraboleng di Pulau Flores dan gunung Ile Boleng di Pulau Adonara. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan dengan luas

44,390,78 Ha. Kondisi klimatologi mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni 257,57 km² (14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur), sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
	1. Wulanggitan	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Flores Timur Daratan		72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,58	1,74
Solor		38	1	226,34	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihama	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,45
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,58	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2020 sebanyak 298.822 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1.812,58 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 164,86 orang per km². Dengan kepadatan sebesar ini, sebenarnya Flores Timur belum menghadapi masalah kependudukan. Akan tetapi kalau dilihat dari potensi alam yaitu lahan kering yang tidak subur, lahan sawah yang tidak berpengairan dan sedikit lahan sawah yang berpengairan maka Flores Timur juga menghadapi masalah kependudukan.

Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Wulanggitang	225,85	7,848	7,913	15,761	69,78
Titehena	154,84	6,948	7,038	13,986	90,32
Larantuka	48,91	21,311	21,410	42,721	873,46
Ile Mandiri	72,76	6,111	6,180	12,291	168,93
Tanjung Bunga	257,57	7,739	7,655	15,194	47,34
Solor Barat	128,20	5,931	6,276	12,207	95,21
Solor Timur	66,56	8,575	8,919	17,494	262,83
Adonara Barat	79,71	7,344	7,350	14,694	184,34
Wotan Ulumado	86,31	5,347	5,373	10,720	12,42
Adonara Timur	91,06	15,780	16,795	32,575	357,73
Klubagolit	44,41	6,581	7,352	13,933	313,74
Witihama	79,43	9,106	9,966	19,072	240,11
Ile Boleng	49,30	9,132	10,093	19,225	389,96
Demon Pagong	85,40	2,645	2,735	5,380	6,30
Lewolema	92,84	5,213	5,216	10,429	112,33
Ile Bura	118,32	4,083	4,009	8,092	68,39
Adonara	56,80	6,158	6,698	12,856	226,34
Adonara Tengah	42,73	7,157	7,340	14,497	339,27
Solor Selatan	31,58	3,630	3,865	7,495	237,33
FLORES TIMUR	1.812,58	146,639	152,183	298,822	164,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 42.721 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 5.380 jiwa.

1.2.2.1 Penduduk Menurut Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	00-04	7,754	6,991	14,745	110,91
2	05-09	13,549	12,191	25,740	111,14
3	10-14	14,731	13,777	28,508	107,26
4	15-19	15,606	14,550	30,156	107,26
5	20-24	15,104	13,946	29,050	108,30
6	25-29	12,083	11,898	23,981	101,55
7	30-34	11,096	10,953	22,049	101,31
8	35-39	9,833	9,904	19,737	99,28
9	40-44	8,746	9,605	18,351	91,06
10	45-49	8,242	9,446	17,688	87,25
11	50-54	7,262	8,639	15,901	84,06
12	55-59	6,157	7,561	13,718	81,43
13	60-64	5,261	6,764	12,025	77,78
14	65-69	3,757	5,014	8,771	74,93
15	70-74	2,809	4,293	7,102	65,43
16	75+	4,649	6,651	11,300	69,90
Jumlah		146,639	152,183	298,822	96,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) sangat mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Flores Timur tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin

penduduk Flores Timur sebesar 96, artinya diantara 100 perempuan terdapat 96 laki-laki.

1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk melihat bagaimana keadaan TPAK di Kabupaten Flores Timur akan disajikan dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin 2019

Jenis Kegiatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	64,888	50,705	115,593
a. Bekerja	62,680	49,337	114,017
b. Pengangguran Terbuka	2,208	1,368	3,576
Bukan Angkatan Kerja	15,054	43,006	58,060
a. Sekolah	9,760	9,372	19,132
b. Mengurus Rumah Tangga	2,093	30,160	32,253
c. Lainnya	3,201	3,474	6,675
Jumlah	79,942	93,711	173,653

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pada Tahun 2019 Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 115.593 orang sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 58.060 orang. Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada angkatan kerja perempuan dan sebaliknya total penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam bukan angkatan kerja didominasi oleh bukan angkatan kerja perempuan sebesar 43.006 orang.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total produk/nilai tambah semua sector ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam satu periode/tahun tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ialah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada satu tahun tertentu.

Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah (PDRB) yang telah dibentuk oleh setiap kegiatan ekonomi pada periode berjalan (berlaku). Disamping itu juga dapat diperoleh gambaran tentang peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam membentuk nilai tambah maupun rata-rata pendapatan penduduk pada periode berjalan. Tabel 1.5 berikut ini dapat kita lihat bagaimana perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2015 sampai dengan 2019

Tabel 1.5

**PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2015-2019**

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.378,34	1.134.146,46	1.231.576,17	1.337.135,62	1.434.567,61
Pertambangan dan Penggalian	35.952,89	39.111,89	41.282,85	44.053,81	47.191,59
Industri Pengolahan	33.192,14	35.766,62	38.522,93	40.965,32	44.263,65
Pengadaan Listrik dan Gas	2.460,79	3.134,58	3.443,66	3.892,25	3.930,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.127,07	1.169,82	1.218,94	1.311,24	1.400,08
Konstruksi	181.564,86	198.389,82	214.051,09	231.835,65	251.518,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323.568,20	361.908,96	388.379,17	416.649,38	451.678,38
Transportasi dan Pergudangan	216.702,38	236.127,66	254.800,58	270.917,06	282.994,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.619,78	4.053,12	4.350,37	4.651,09	4.799,70
Informasi dan Komunikasi	175.905,42	186.884,96	200.581,37	214.277,78	229.853,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	145.754,26	160.493,17	178.975,36	187.851,28	198.161,90
Real Estate	129.749,56	144.291,23	154.754,22	164.217,20	162.888,60
Jasa Perusahaan	5.802,18	6.539,06	7.334,67	7.818,34	8.197,91

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	588.478,52	657.646,58	737.939,94	829.716,50	896.883,28
Jasa Pendidikan	639.697,26	685.415,12	718.998,90	784.439,64	842.749,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.465,51	98.556,80	105.622,71	114.881,68	122.873,46
Jasa lainnya	187.617,56	209.616,79	229.290,68	246.675,01	268.232,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.813.036,73	4.163.252,66	4.511.123,61	4.901.288,87	5.252.183,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	3.813.036,73	4.163.252,66	4.511.123,61	4.901.288,87	5.252.183,19

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2020

Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Flores Timur didominasi oleh 3 (Tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Perbandingan PDRB Harga Konstan disuatu wilayah antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya merupakan perbandingan kuantum produk antara dua tahun tanpa dipengaruhi oleh harga (inflasi/deflasi) pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari suatu tahun ke tahun berikutnya adalah pertumbuhan riil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 1.6

PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Tahun 2015-2019

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	795.366,67	821.473,85	857.692,80	901.328,96	939.888,59
Pertambangan dan Penggalan	27.616,77	29.426,21	31.103,18	32.780,14	34.711,35
Industri Pengolahan	28.805,44	30.404,69	32.097,51	32.759,72	34.359,36
Pengadaan Listrik dan Gas	2.026,83	2.262,90	2.275,59	2.493,22	2.515,35



Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	879,66	890,60	906,55	958,40	999,40
Konstruksi	167.816,81	178.232,92	187.318,57	196.789,43	208.521,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	232.852,22	244.201,29	255.050,50	267.402,35	281.035,19
Transportasi dan Pergudangan	164.062,83	170.888,48	178.878,38	186.549,22	192.576,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.456,59	2.555,66	2.668,42	2.794,11	2.857,57
Informasi dan Komunikasi	155.788,94	164.689,86	173.482,27	184.653,69	195.420,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	121.929,61	129.499,95	137.088,08	139.178,93	143.899,52
Real Estate	101.429,56	105.645,19	111.776,35	116.783,70	116.104,71
Jasa Perusahaan	3.974,12	4.203,12	4.454,71	4.510,65	4.685,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	506.188,18	538.455,53	575.244,82	612.333,91	654.824,28
Jasa Pendidikan	408.988,93	416.585,83	417.380,01	428.651,56	449.295,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.993,73	69.879,85	72.370,84	75.748,14	78.914,25
Jasa lainnya	128.654,81	136.263,22	142.668,44	147.862,16	154.888,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.915.831,72	3.045.559,15	3.182.457,01	3.333.578,30	3.495.496,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	2.915.831,72	3.045.559,15	3.182.457,01	3.333.578,30	3.495.496,49

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2020

Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Flores Timur pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Flores Timur atas dasar harga konstan 2019, mencapai 3,333 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari sebelumnya 3,182 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,75 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2019

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha			
	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.28	4.41	5.09	4,28
Pertambangan dan Penggalian	6.55	5.70	5.39	5,89
Industri Pengolahan	5.55	5.57	2.06	4,88
Pengadaan Listrik dan Gas	11.65	0.56	9.56	0,89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.24	1.79	5.72	4,28
Konstruksi	6.21	5.10	5.06	5,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.87	4.44	4.84	5,10
Transportasi dan Pergudangan	4.16	4.68	4.29	3,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.03	4.41	4.71	2,27
Informasi dan Komunikasi	5.71	5.34	6.44	5,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.21	5.86	1.53	3,39
Real Estate	4.16	5.80	4.48	-0,58
Jasa Perusahaan	5.76	5.90	1.26	3,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.37	6.83	6.45	6,94
Jasa Pendidikan	1.86	0.19	2.70	4,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.31	3.56	4.67	4,18
Jasa lainnya	5.91	4.70	3.64	4,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,45	4,49	4,75	4,86

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2020

Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

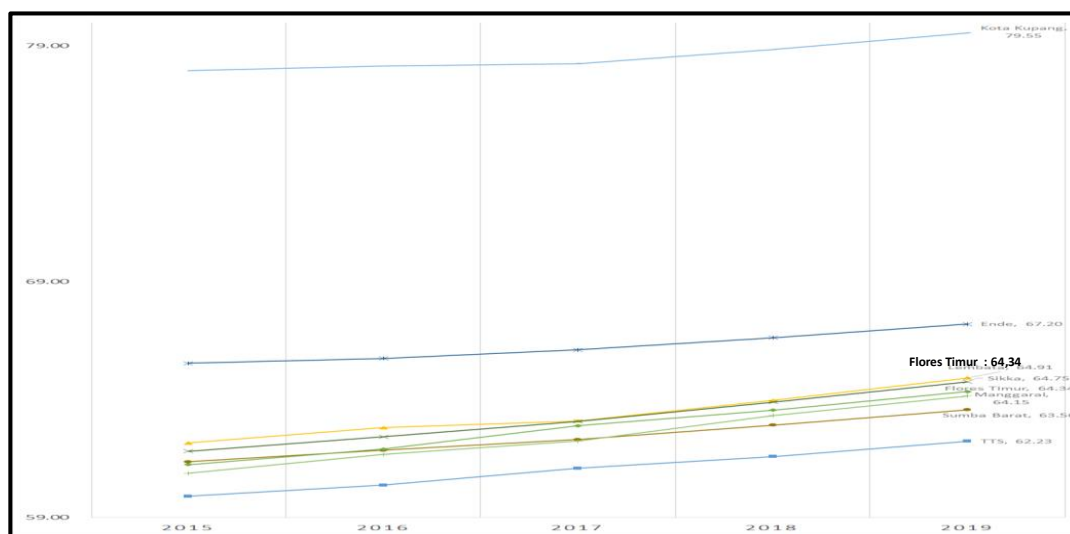
1.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata

lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sampai dengan tahun 2019, IPM Flores Timur mencapai 64,34. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,23.

Gambar 1.2 | Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

1.2.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - m Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - n Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - p Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 - u Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan

Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;

- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Kecamatan, terdiri dari:

- a. Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Wulanggintang dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
- s. Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Nominatif PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 keadaan 31 Desember 2020 sebanyak 4.951 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.248 orang dan perempuan sebanyak 2.703 orang. Pada Tabel 1.8 dan 1.9 digambarkan rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	SD	30	4	34
2	SLTP	41	5	46
3	SLTA	747	577	1.324
4	D.I	17	116	133
5	D.II	166	124	290
6	D.III	213	650	863
7	S.1	984	1215	2.199
8	S.2	50	12	62
9	S.3	-	-	-
Jumlah		2.248	2.703	4.951

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2020

Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Gol.I	35	6	41
2	Gol.II	533	575	1.108
3	Gol.III	1.221	1.820	3.041
4	Gol.IV	459	302	761
Jumlah		2.248	2.703	4.951

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2020

Berdasarkan data Jabatan Struktural Tahun 2020, terdapat 858 Jabatan dengan 755 Jabatan terisi dan masih terdapat 103 jabatan yang lowong keadaan 31 Desember Tahun 2020 sesuai Tabel 1.10 di bawah ini :

Tabel 1.10

Data Jabatan Struktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1	JPT	36	33	3
2	Administrator	183	183	-
3	Pengawas	639	539	100
Jumlah		858	755	103

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2020

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.3.1 Permasalahan Terkait Program Prioritas

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;
 - c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
 - e. Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Tingginya angka DO;
 - h. Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;
 - i. Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
 - j. Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
 - l. Angka stunting yang tergolong tinggi;

- m. AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
- n. Belum adanya lembaga perlindungan anak;
- o. Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
- p. Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.

2. Bidang Ekonomi

- a. Rendahnya pendapatan masyarakat;
- b. Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
- c. Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
- d. Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
- e. Pemetaan Kawasan;
- f. Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
- g. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan rama lingkungan;
- h. Ketersediaan energi, protein, lemak;
- i. Pola panganekaragaman pangan;
- j. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- k. Regulasi terkait pengolahan sumber daya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
- l. Perluasan pemasaran garam.

3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
- b. Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
- c. Prasarana transportasi laut belum memadai;
- d. Peralatan uji kir belum berfungsi;
- e. Pendistribusian air PDAM kurang merata;
- f. Menurunnya debit air pada sumber mata air;
- g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
- h. Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;
- i. Masih ada pertambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat;
- j. Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- k. Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
- l. Masih banyak beceklog;
- m. Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
- n. Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;

- o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
- p. Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
- q. Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang,

4. Bidang Pemerintahan

- a. Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan publik;
- b. Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
- c. Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
- e. Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
- f. Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

1.3.2 Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Kondisi geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

1.3.3 Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini menampilkan sejumlah permasalahan adalah :

1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengkomulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik;
4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat;
5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI;
6. Di bidang olahraga prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

1.3.3 Permasalahan pada aspek pelayanan umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;

3. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB;
6. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
7. Sistem dan prosedur kerja dilingkungan aparaturnya Negara belum efisiensi, efektif dan berprilaku hemat;
8. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
9. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal;
10. Belum optimalnya pelayanan persampahan, karena belum tersedianya TPS secara merata dalam kota dan TPK di luar kota;
11. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan;
12. Masih rendahnya kapasitas aparaturnya pemerintah daerah serta masih rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
13. Belum efektifnya lembaga penyelenggara Negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

1.3.5 Permasalahan pada aspek daya saing

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani;
2. Rendahnya pendapatan asli daerah;
3. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
5. Belum berkembangnya investasi di daerah;
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

1.3.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2020, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian;
2. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut yang bersinergi dengan pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan biota/ mamalia laut;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;
5. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
6. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
7. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan belum memadai;
8. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum memadai;
9. Masih tingginya pertumbuhan penduduk;
10. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
11. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
13. Ketersediaan air baku;
14. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
15. Lingkungan hidup;
16. Pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah, Kondisi Pemerintahan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Bab I juga berisi Permasalahan Utama (*strategis issue*) serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Daerah yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Ringkasan RPJMD Tahun 2017-2022 serta Agenda Pembangunan Daerah, juga disajikan Program dan Pencapaian Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur, juga disajikan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta capaian kinerja keuangan daerah dengan menyajikan realisasi anggaran per bidang urusan.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2017- 2022

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut,

sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali
- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:



1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Langkah-langkah percepatan melalui misi selamatkan orang muda, selamatkan infrastruktur, selamatkan tanaman rakyat, selamatkan laut Flores Timur dan reformasi birokrasi serta didukung dengan tiga kebijakan strategis yakni :

1. Kebijakan pembangunan pendidikan,
2. Kebijakan pembangunan pariwisata, dan
3. Kebijakan pembangunan kesehatan diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran RPJPD pada lima tahun ketiga.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 pada masing-masing visi dan misi sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah ekonomi

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kemandirian orang muda;

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah wirausahawan baru.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.

Indikator Kinerja :

- a. Tingkat Pengangguran terbuka.

Tujuan 2 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya

Sasaran :

- 1) Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah konflik sosial antar pemuda.

- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Indikator Kinerja :

- a. Rata-rata lama sekolah

- b. Angka partisipasi murni :

- Persentase PAUD
- Persentase Sekolah Dasar (SD)
- Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- c. Angka Partisipasi Kasar :

- Persentase PAUD

- Persentase Sekolah Dasar (SD)
 - Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d. Angka Melek Huruf
 - e. Angka Buta Huruf
 - f. Angka Melanjutkan Pendidikan :
 - Ke SD
 - Ke SMP
 - Ke SMA
 - g. Angka kelulusan (AL)
 - SD/MI
 - SMP/MTs
 - h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1
 - i. Persentase sarana prasarana pendidikan (SD, SMP kondisi baik)
 - SD
 - SMP
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :
- Indikator Kinerja :
- a. Usia Harapan Hidup
 - b. Angka kematian bayi
 - c. Angka kematian ibu
 - d. Angka gizi buruk
 - e. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar
 - f. Cakupan pelayanan usia produktif
 - g. Cakupan penanganan kasus penyakit menular
 - h. Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular
 - i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
 - j. Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+
 - k. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
 - l. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

m. Cakupan peserta KB aktif

n. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin

- 4) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja :

a. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani

- 5) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Indikator Kinerja :

a. Partisipasi perempuan pada jabatan publik

b. Partisipasi angkatan kerja perempuan

c. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak

Tujuan 3 : Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kinerja transportasi

Indikator Kinerja :

a. Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik

b. Persentase angkutan umum laik jalan

c. Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan

d. Rasio izin trayek

- 2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

Indikator Kinerja :

a. Rasio jaringan irigasi

b. Akses air minum aman

c. Persentase daerah mata air yang dikonservasi

Tujuan 4 : Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana

Sasaran :



1) Mengurangi resiko akibat bencana

Indikator Kinerja :

- a. Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun.

2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- a. Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan
- b. Persentase rehabilitasi lahan kritis

Tujuan 5 : Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas

Sasaran :

1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman

Indikator Kinerja :

- a. Persentase rumah tidak layak huni
- b. Persentase backlog
- c. Akses limbah domestik sanitasi layak
- d. Akses air minum aman
- e. Persentase sampah perkotaan yang ditangani
- f. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik
- g. Persentase rumah tangga pengguna listrik
- h. Persentase luas kawasan permukiman kumuh perkotaan

Tujuan 6 : Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran :

1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah dokumen perencanaan
- b. Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang
- c. Persentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan

Tujuan 7 : Meningkatnya produksi tanaman rakyat

Sasaran :

1) Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Indikator Kinerja :



- a. Persentase petani yang ditingkatkan kesejahteraan
- b. Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan :
 - Padi
 - Jagung
 - Kedelai
 - Sorgum
- c. Tanaman hortikultura
- d. Tanaman perkebunan
 - Jambu mete
 - Kelapa
 - Kakao
- e. Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan
 - Lahan tanaman pangan (Ha)
 - Lahan hortikultura (Ha)
 - Lahan perkebunan (Ha)
- f. Ketersediaan Pangan
 - Energi (kkl/kap/hr)
 - Protein (gr/kap/hr)
 - Lemak (gr/kap/hr)
- g. Persentase Konsumsi Pangan (PPH)

Tujuan 8 : Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat

Sasaran :

- 1) Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;

Indikator Kinerja :

- a. Persentase penguatan system pemasaran.

Tujuan 9 : Terselamatkannya Ekosistem Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut;

Indikator Kinerja :

- a. Persentase penanganan ilegal fishing
- b. Persentase penanganan destruktif e fishing
- c. Persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik

Tujuan 10 : Terpeliharanya Potensi Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator Kinerja :

- a. Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap
- b. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya



- c. Luas area garam (Ha)
- d. Jumlah produksi garam (Ton/tahun)
- e. Jumlah kawasan ekonomi khusus kelautan
- f. Jumlah kawasan budidaya perikanan.

Tujuan 11 : Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel

Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan
- b. Jumlah OPD yang memiliki SOP
- c. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk
- d. Rasio pasangan berakate nikah
- e. Rasio penduduk berakate kelahiran
- f. Jumlah izin yang dilayani tiap tahun
- g. Pola pengembangan karier ASN daerah
- h. Ketersediaan Dokumen Perencanaan
- i. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
- j. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda
- k. Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
- l. Persentase OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi
- m. Persentase desa sadar hukum dan komunitas
- n. Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat
- o. Jumlah kasus kriminal di masyarakat
- p. Cakupan pelayanan korban bencana
- q. Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan
- r. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu
- s. Persentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah
- t. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif

- a. Desa sangat tertinggal
- b. Desa tertinggal
- c. Desa berkembang
- d. Desa maju
- e. Desa mandiri

Tabel 2.1

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Selamatkan Orang Muda Flores Timur	1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	a. Meningkatkan kemandirian orang muda b. Meningkatkan kesempatan kerja	1) Jumlah wirausahawan baru 2) Tingkat pengangguran terbuka
	2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	a. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial antar pemuda
		b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1) Rata-rata lama sekolah 2) Angka partisipasi murni - Persentase PAUD - Persentase SD - Persentase SMP 3) Angka partisipasi kasar - Persentase PAUD - Persentase SD - Persentase SMP 4) Angka melek huruf 5) Angka buta huruf 6) Angka melanjutkan pendidikan - Ke SD - Ke SMP - Ke SMA 7) Angka kelulusan (AL) - SD /MI - SMP /MTs 8) Angka Pendidikan yang ditamatkan 9) Angka Putus Sekolah 10) Guru yang memenuhi kelulusan S1 11) Guru yang bersertifikasi pendidikan 12) Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik - SD - SMP

1	2	3	4
		c. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	1) Angka kematian bayi 2) Angka kematian ibu 3) Angka gizi buruk 4) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 5) Cakupan pelayanan usia produktif 6) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 7) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 8) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 9) Penemuan penderita baru penyakit TB - BT+ 10) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 11) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 12) Cakupan peserta KB aktif
		d. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
		e. Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1) Partisipasi perempuan pada jabatan public 2) Partisipasi angkatan kerja perempuan 3) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak 4) Cakupan Peserta KB Aktif 5) Cakupan Akseptor KB
Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	3. Tersedianya Infrastruktu Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	a. Meningkatkan kinerja transportasi	1) Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik 2) Persentase angkutan umum laik jalan 3) Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 4) Rasio izin trayek 5) Bertambahnya panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 6) Bertambahnya jaringan jembatan dalam kondisi baik 7) Terpeliharanya jaringan jalan dalam kota larantuka 8) Terpeliharanya jembatan kabupaten 9) Terpeliharanya alat-alat berat dan alat angkutan

1	2	3	4
		b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1) Rasio jaringan irigasi 2) Akses air minum aman Persentase daerah mata air yang dikonservasi
	4. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	a. Mengurangi resiko akibat bencana	Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun
		b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1) Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 2) Persentase rehabilitasi lahan kritis
	5. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1) Persentase rumah tidak layak huni 2) Akses limbah domestik sanitasi layak 3) Akses air minum aman 4) Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 5) Persentase rumah tangga pengguna listrik 6) Persentase luas kawasan permukiman kumuh perkotaan
	6. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1) Jumlah dokumen perencanaan 2) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 3) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
	7. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	1) Persentase petani yang ditingkatkan kesejahteraan 2) Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan : 3) Tanaman hortikultura 4) Tanaman perkebunan : 5) Ketersediaan pangan 6) Persentase Konsumsi Pangan (PPH).
	8. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	Persentase penguatan sistem pemasaran

1	2	3	4
Selamatkan Laut Flores Timur	9. Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Persentase penanganan illegal fishing 2) Persentase penanganan destruktif e-fishing 3) Persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik
	10. Terpeliharanya Potensi Laut	Meningkatnya produksi perikanan	1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 3) Luas area garam (Ha) 4) Jumlah produksi garam (ton/tahun) 5) Jumlah kawasan ekonomi khusus kelautan 6) Jumlah kawasan budidaya perikanan
Reformasi Birokrasi	11. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 2) Jumlah OPD yang memiliki SOP 3) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 4) Rasio pasangan berakta nikah 5) Rasio penduduk berakte kelahiran 6) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 7) Pola pengembangan karier ASN daerah 8) Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab 9) Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, dan Lembaga Donor 10) Persentase hasil penelitian/survey, kajian dan lain- lain 11) Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi SDA.

1	2	3	4
			12) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah 13) Tercapainya level kapabilitas APIP 14) Persentase OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 15) Persentase desa sadar hukum dan komunitas 16) Jumlah konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 17) Cakupan pelayanan korban bencana 18) Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan 19) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu 20) Persentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah 21) Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik.
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	1) Desa sangat tertinggal 2) Desa tertinggal 3) Desa berkembang 4) Desa maju 5) Desa mandiri

2.2.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta acuan bagi *stakeholders* terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit ***Desa Membangun Kota Menata***.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dari masing-masing strategi dirumuskan program prioritas disertai pagu indikatif. Selain itu sebagai upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan pula kebijakan

strategis pembangunan yang dilaksanakan melalui spirit *Desa Membangun Kota Menata*. Kebijakan strategis tersebut adalah:

1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan
2. Kebijakan Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, membangun prasarana dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honor, peningkatan kemampuan guru dan pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa asal Flores Timur yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Flores Timur.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa desa wisata dan kawasan wisata.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk penempatan tenaga kesehatan yang memadai untuk setiap desa (gizi, bidan dan perawat), peningkatan fungsi Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, dan peningkatan kapasitas pelayanan RSUD.



2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	1. Meningkatkan kemandirian orang muda 2. Meningkatkan kesempatan kerja	1) Jumlah wirausahawan baru 2) Tingkat pengangguran terbuka
2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	3. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan 4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda 4) Rata –Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMA 16) Angka kelulusan (AL) SD /MI 17) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs 18) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 20) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 21) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	22) Usia Harapan Hidup 23) Angka Kematian Bayi 24) Angka kematian ibu 25) Angka gizi buruk 26) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 27) Cakupan pelayanan usia produktif 28) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 29) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 30) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 31) Penemuan penderita baru penyakit TB – BT+

1	2	3
		32) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 33) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 34) Cakupan peserta KB aktif 35) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin
	6. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	36) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
	7. Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	37) Partisipasi perempuan pada jabatan publik 38) Partisipasi angkatan kerja perempuan 39) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur		
1. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatnya kinerja transportasi	1) Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik 2) Persentase angkutan umum laik jalan 3) Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 4) Rasio izin trayek
	2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	5) Rasio jaringan irigasi 6) Akses air minum aman 7) Persentase daerah mata air yang dikonservasi
2. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	3. Mengurangi resiko akibat bencana	8) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9) Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 10) Persentase rehabilitasi lahan kritis
3. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	11) Persentase rumah tidak layak huni 12) Persentase Backlog 13) Akses limbah domestik sanitasi layak 14) Akses air minum aman 15) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani 16) Persentase Panjang Drainase dalam kondisi Baik 17) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik 18) Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

1	2	3
4. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	6. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	19)Jumlah dokumen perencanaan 20)Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 21)Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur		
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	1) Persentase petani yang ditingkatkan kesejahteraan 2) Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan Padi 3) Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan Jagung 4) Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan Kedelai 5) Jumlah produksi pertanian (dalam ton) tanaman pangan Sorgum 6) Tanaman hortikultura 7) Tanaman perkebunan Jambu Mete 8) Tanaman perkebunan Kelapa 9) Tanaman perkebunan Kakao 10) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan 11) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura 12) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan 13) Ketersediaan pangan energi 14) Ketersediaan Pangan Protein 15) Ketersediaan Pangan Lemak 16) Persentasi Konsumsi Pangan
2. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	2. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	17) Persentase penguatan sistem pemasaran
Misi 4 Selamatkan Laut Rakyat Flores Timur		
1. Terselamatkannya Ekosistem Laut	1. Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Persentase penanganan <i>illegal fishing</i> 2) Persentase penanganan <i>destructive fishing</i> 3) Persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik
2. Terpeliharanya Potensi Laut	2. Meningkatnya produksi perikanan	4) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 5) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 6) Luas area garam (Ha) 7) Jumlah produksi garam (ton/tahun) 8) Jumlah kawasan ekonomi khusus kelautan 9) Jumlah kawasan budidaya perikanan

1	2	3
Misi 5 Reformasi Birokrasi		
1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	1) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 2) Jumlah OPD yang memiliki SOP 3) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 4) Rasio pasangan berakta nikah 5) Rasio penduduk berakte kelahiran 6) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 7) Pola pengembangan karier ASN daerah 8) Ketersediaan dokumen perencanaan 9) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda 10) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda 11) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah 12) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 13) Desa Sadar Hukum dan Komunitas 14) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 15) Jumlah Kasus Kriminal di Masyarakat 16) Cakupan pelayanan korban bencana 17) Jumlah Konsolidasi Demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan 18) Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu 19) Persentase Pemberdayaan Forum Kemitraan Pemerintah 20) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan Politik
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	21) Desa sangat tertinggal 22) Desa tertinggal 23) Desa berkembang 24) Desa maju 21) Desa mandiri

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 ada pada Lampiran.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perubahan / Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	168
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	10
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD /MI 16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs 17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	Tahun % % % % % % % % % % % % % % % % %	7,27 48 91,02 71,62 46 105 99 98,88 1 100 97,59 99,99 98,07 95 59,01 20,95
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup 21) Angka Kematian Bayi 22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH) 23) Angka gizi buruk 24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 25) Cakupan pelayanan usia produktif 26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 29) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+	Tahun % % % % % Kasus Kasus % %	66,70 18/1000 120/100.000 0,3 100 70 1.077 40.251 100 90

1	2	3	4	5
		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 32) Cakupan peserta KB aktif 33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	% % % %	100 70 68 88
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,25
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik 36) Partisipasi angkatan kerja perempuan 37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	% % %	41,94 65 20
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik 39) Pengujian Angkutan umum laik jalan 40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 41) Dokumen izin trayek	Unit Kali Unit Dok	2 630 10 35
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi 43) Akses air minum aman 44) Daerah mata air yang dikonservasi	% % Lokasi	0,41 100 10
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 47) Rehabilitasi lahan kritis	Jenis Usaha Ha	154 8
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni 49) Akses limbah domestik sanitasi layak 50) Akses air minum aman 51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	Unit Unit SR %	58 552 1092 100
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan 53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Dok % Lokasi	2 100 1

1	2	3	4	5
14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	55) Tanaman perkebunan Jambu Mete 56) Tanaman perkebunan Tembakau 57) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan 58) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura 59) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan 60) Ketersediaan pangan energi 61) Ketersediaan Pangan Protein 62) Ketersediaan Pangan Lemak 63) Persentasi Konsumsi Pangan	Ton Kg Ha Ha Ha kkap gr gr %	1867 800 110 14 570 2.386 kkap 66.50 gr 55.00 gr 75
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	64) Penguatan sistem pemasaran	Media	2
16.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	65) Penanganan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> 66) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Kasus Jenis	10 10
17.	Meningkatnya produksi perikanan	67) Peningkatan produksi perikanan tangkap 68) Peningkatan produksi perikanan budidaya 69) Luas Area Garam 70) Jumlah Produksi Garam 71) Jumlah kelompok budidaya perikanan	Ton Ton Ha Ton Kelompok	15.578 304,6 2,5 100 45
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	72) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 73) Jumlah OPD yang memiliki SOP 74) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk 75) Rasio pasangan berakta nikah 76) Rasio penduduk berakte kelahiran 77) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 78) Pola pengembangan karier ASN daerah 79) Ketersediaan dokumen perencanaan 80) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda 81) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah di tetapkan dengan Perda 82) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah 83) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 84) Desa Sadar Hukum dan Komunitas 85) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 86) Cakupan pelayanan korban bencana	OPD OPD KTP % Akte Izin Orang Dok Dok Dok Opini OPD % Kasus %	7 10 20.000 20,36 35.000 2300 206 Ada Ada Ada WTP 30 15,30 121 100

1	2	3	4	5
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	87) Desa sangat tertinggal 88) Desa tertinggal 89) Desa berkembang 90) Desa maju 91) Desa mandiri	% % % % %	0 56,77 34,06 8,30 0,87

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Orang Muda			
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	257.761.513,-	APBD
2.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	471.782.000,-	APBD
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	7.410.000,-	APBD
2.	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	42.921.000,-	APBD
3.	Program peningkatan kesempatan kerja	361.242.050,-	APBD
4.	Program Transmigrasi local	17.089.400,-	APBD
Sasaran 3 : Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan			
1.	Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal <i>Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual</i>	183.036.250,-	APBD
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional	29.503.000,-	APBD
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.086.238.900,-	APBD
2.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	73.540.947.925,-	APBD
3.	Program Pendidikan Non Formal	673.438.750,-	APBD
4.	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	15.392.050,-	APBD
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
1.	Program obat dan perbekalan kesehatan	4.901.451.036,-	APBD
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	56.373.771.313,-	APBD
3.	Program pengawasan obat dan makanan	159.328.000,-	APBD
4.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.453.973.292,-	APBD
5.	Program perbaikan gizi masyarakat	2.411.487.400,-	APBD
6.	Program Pengembangan lingkungan sehat	1.575.128.435,-	APBD

7.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.255.851.018,-	APBD
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	585.826.386,-	APBD
9.	Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan <i>Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan</i>	218.100.000,-	APBD
10.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1.294.608.449,-	APBD
11.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya	7.157.977.47,-	APBD
12.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah sakit mata	57.394.306.813,-	APBD, DAU, DAK
13.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	324.014.499,-	APBD
Sasaran 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
1.	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.507.841.700,-	APBD
2.	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	779.520.550,-	APBD
3.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	67.352.900,-	APBD
4.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.506.303.900,-	APBD
Sasaran 7 : Meningkatkan Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			
1.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	66.704.800,-	APBD
2.	Program pelayanan kontrasepsi	185.559.000,-	APBD
Sasaran 8 : Meningkatkan Kinerja Transportasi			
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	35.969.450,-	DAU
2.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	62.279.187,-	DAU
3.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	220.297.000,-	
4.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	127.423.500,-	APBD
Sasaran 9 : Meningkatkan Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya			
1.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	4.179.429.717	DAU
2.	Program pengembangan air minum dan sanitasi	2.210.015.940,-	DAU
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	9.777.787,-	DAU
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.212.188.300	
Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana			

1.	Program pengendalian banjir	3.066.438.300,-	DBH
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1.212.188.200,-	DAU
2.	Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	228.267.910,-	DAU
Sasaran 12 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman			
1.	Program Pengembangan Perumahan	898.709.850,-	APBD
2.	Program Pelayanan Limbah Domestik	3.034.768.150,-	APBD
3.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	3.613.651.000,-	APBD
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	768.770.950,-	APBD
Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota			
1.	Program perencanaan pembangunan daerah	960.227.600,-	APBD
2.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	31.005.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	282.971.500,-	DAU
Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal			
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.734.147.972,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	106.096.175,-	APBD
Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah			
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri <i>Kegiatan Pengambilan Data dan Publikasi Informasi Perdagangan</i>	44.308.900,-	APBD
Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut			
1.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	138.643.780,-	DAU
3.	Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	27.560.000,-	DAU
4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	27.731.777,-	DAU
Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan			
1.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.070.058.450,-	DAK, DAU
2.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	52.956.560,-	DAU
Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Program peningkatan pelayanan publik	562.127.788,-	APBD
2.	Program penataan administrasi kependudukan	1.365.067.942,-	APBD II, DAK

3.	Program pelayanan perizinan terpadu	106.013.750,-	APBD
4.	Program pembinaan dan pengembangan aparaturn <i>Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS</i>	301.368.400,-	APBD
5.	Program perencanaan pembangunan daerah	960.227.600,-	APBD
6.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.292.531.086,-	APBD
7.	Program penataan peraturan perundang-undangan <i>Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Desa</i>	35.930.000,-	APBD
8.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	79.152.100,-	APBD
9.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	389.641.000,-	APBD
Sasaran 19 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif			
1.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	130.005.000,-	APBD
2.	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	53.003.325,-	APBD
3.	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	272.653.750,-	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	191.748.900,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun 2020

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam RPJMD terdapat 5 Misi, 11 Tujuan, 19 Sasaran, dengan 111 Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

Realisasi – (Realisasi – Rencana)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD dapat diringkaskan dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga terdapat 19 sasaran dengan indikator kinerja yang semula berjumlah 111 indikator kinerja sasaran menjadi 91 indikator kinerja sasaran sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 37 indikator kinerja
 - Misi 2 terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 17 indikator kinerja
 - Misi 3 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja
 - Misi 4 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja
 - Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja
- (19 Sasaran Strategis dan 91 Indikator Kinerja Utama)

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	2	7	37	2	2	1	2
2	Misi 2	4	6	17	2	3	-	1
3	Misi 3	2	2	10	-	2	-	1
4	Misi 4	2	2	7	-	1	-	-
5	Misi 5	1	2	20	1	1	-	-
Jumlah		11	19	91	5	9	1	4

Dari 19 (Sembilan belas) sasaran dengan 91 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah :

Tabel 3.3

Presentasi Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi 1 (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	28,57
2	Baik (B)	2	28,57
3	Cukup (C)	1	14,28
4	Kurang (K)	2	28,57
Jumlah		7	100
Misi 2 (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	33,33
2	Baik (B)	3	50,00
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	16,67
Jumlah		6	100
Misi 3 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	2	100
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		2	100
Misi 4 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	50
3	Cukup (C)	-	-

4	Kurang (K)	1	50
Jumlah		2	100
Misi 5 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	1	50
2	Baik (B)	1	50
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		2	100
Rata-Rata Capaian Misi 1-5		19	89,73

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 91 indikator sasaran, diketahui bahwa 5 indikator sasaran kategori Baik Sekali atau 26,31%, 9 indikator sasaran kategori Baik atau 47,36 % , 1 indikator sasaran dengan kategori Cukup atau 5,26% dan 4 indikator sasaran kategori Kurang atau 21,05%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **89,73 %** dengan kategori **Baik** . Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020 **Baik**.

3.2 Analisis Capaian

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1: Selamatkan Orang Muda Flores Timur

Diukur melalui 7 sasaran dengan 37 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kemandirian Orang Muda

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah wirausahawan baru	UMKM	250	593	237,2	168	6	4
Rata-rata capaian kinerja					237,2			4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Orang Muda**, 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 4% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 237,2% (Satuan : Orang) dengan kategori **kurang**. Nilai realisasi ini diperoleh dari Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah. Pada kegiatan dimaksud terdapat 5 Kelompok UMKM yang memperoleh fasilitas mesin pengolahan pakan ternak multi fungsi (5 Unit untuk 5 Kelompok) dan 1 Kelompok UMKM Madu Hutan Mahares Flores Timur mendapat fasilitas peralatan penunjang berupa : tanki air 1000 liter, etalase, meja kayu kelas 1 ½ biro dan kursi kayu kelas 1.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target dimaksud :

1. Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan prasarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu/ berkesinambungan kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

Langkah antisipasi dalam mengatasi masalah/ kendala adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
4. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi, dan meningkatkan kemandirian koperasi.

Tabel 3.5

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	257.761.513,-	254.686.000,-	98,81
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	471.782.000,-	436.537.100,-	92,53
Rata-rata		729.543.513,-	691.223.100,-	94,75

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kemandirian Orang Muda adalah Rp. 691.223.100,- dari target Rp. 729.543.513,- atau sebesar 94,75%.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kesempatan Kerja

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,09	26,64	237,2	2,68	3,09	115,00
Rata-rata capaian kinerja					237,2			115,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesempatan Kerja**, 1 Indikator Sasaran mencapai target, rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar **115%**, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 237,2 %, tetapi masih dikategorikan **baik sekali**. Nilai realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja, dimana jumlah pengangguran sebesar 3.576 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 115.593 orang. Dalam mendukung sasaran peningkatan kesempatan kerja ini terdapat 2 (dua) kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, yakni sebagai berikut:

1. Semenisasi Lorong dan Gang Desa Sistem Padat Karya

Target kinerjanya adalah terlaksananya pekerjaan semenisasi lorong dan gang desa sistem padat karya yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 87 orang. Realisasinya adalah tersedianya semenisasi lorong dan gang desa sistem padat karya di Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga dan Desa Mokantarak Kec. Larantuka yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 81 orang.

2. Kerjasama Kemitraan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Target kinerja kegiatan ini adalah jumlah Tim Pokja yang mengikuti rencana aksi Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Flores Timur sebanyak 35 orang. Realisasi kinerjanya adalah menurunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Flores Timur yang non-prosedural oleh karena peningkatan kinerja Tim Pokja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja antar Daerah Asal Kabupaten Flores Timur (100%).

Adapun kendala yang dihadapi yaitu masalah koordinasi yang luas karena melibatkan berbagai komponen sumber daya manusia dan kelembagaan sehingga sangat riskan terhadap penjadwalan kegiatan dan pendanaan secara tepat. Sehingga dalam mengatasi masalah ini, membutuhkan tingkat koordinasi yang lebih luas kiranya pertemuan evaluasi berkala pada tingkat Kabupaten lebih di tingkatkan mengingat setiap OPD memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas.

Tabel 3.7

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.410.000,-	7.160.000,-	96,63
2	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	42.921.000,-	42.649.000,-	99,37
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	361.243.050,-	360.953.300,-	99,92
4	Program Transmigrasi Local	17.089.400,-	17.089.400,-	100
Rata-rata		428.663.450,-	427.851.700,-	99,81

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah Rp. 427.851.700,- dari target Rp. 428.663.450,- atau sebesar 99,81%.

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah konflik antar pemuda	Kasus	-	-	-	10	10	100
Rata-rata capaian kinerja								100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**, 1 Indikator Sasaran

mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai Realisasi Tahun 2020 tersebut diperoleh dari kegiatan fasilitasi penanganan masalah aktual atas kerjasama dari Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah teknis dan Aparat Keamanan (TNI-POLRI), serta peran seluruh stakeholder khususnya tokoh kunci dan lembaga kemitraan. Berdasarkan inventarisasi masalah aktual dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur terdapat 10 kasus mulai dari bulan Januari s/d Desember 2020. Adapun 10 kasus tersebut antara lain :

1. Konflik Sosial pengusiran dan perampasan atas tanah dan tempat tinggal milik keluarga Katarina Kewa Deran Suku Umakela dengan Bapak Hendrikus Sanga Nuho Suku Lamanele Desa Harubala, Kecamatan Ile Boleng
2. Konflik Sosial Antara Suku Lamatoka dan Kewaelaga Desa Sandosi, Kecamatan Witiama yang menimbulkan korban 6 orang meninggal dunia
3. Masalah Tanah antara Watololong Desa Oesayang, Kecamatan Adonara Tengah dengan Desa Gelong Kecamatan Adonara Timur
4. Masalah Persehatian batas wilayah administrasi Desa Riangkotek dan Desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema
5. Masalah Tapal Batas tanah adat antara pihak komunitas adat Watowiti Kecamatan Ile Mandiri dan Lewerang Kecamatan Larantuka
6. Mediasi Penyelesaian Masalah HGU PT REROLARA Hokeng dengan masyarakat suku Tukan Kecamatan Wulanggintang.
7. Konflik Sosial Suku Lewomuda merebut posisi hak kesulungan dalam suku antara bapak Gabriel Kopong Blada dengan Bapak Frederikus Beletun Bain Desa Kolilanang Kecamatan Adonara
8. Konflik Sosial antara suku Lewoblolong dan suku Riangtobi di Kelurahan Lamatwelu Kecamatan Adonara Timur.
9. Masalah Batas Wilayah Administrasi antara desa Lamawalang dengan Kelurahan Waibalun
10. Masalah Tanah Antara Desa Kobasoba dengan desa Ile Gerong Kecamatan Titihena.

Selain itu dalam menekan kasus konflik sosial antar pemuda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur dari tahun 2018 hingga 2020 melakukan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di 5 Kecamatan, yaitu Kec. Lewolema, Kec. Solor Barat, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Adonara Timur dan Kec. Adonara. Kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa akan 4 pilar kebangsaan

dan juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dikalangan generasi muda khususnya remaja tingkat sekolah menengah atas.

Adapun kendala yang dihadapi adalah hampir semua kegiatan membutuhkan koordinasi yang luas karena melibatkan berbagai komponen sumberdaya manusia dan kelembagaan sehingga sangat riskan terhadap penjadwalan kegiatan dan pendanaan secara tepat. Sehingga perlunya peningkatan pemantapan koordinasi tentang kebijakan, program dan kegiatan dengan keterlibatan Stakeholder.

Tabel 3.9

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 3

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal <i>Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual</i>	183.036.250,-	183.515.000,-	98,12
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional	29.503.000,-	28.895.000,-	97,94
Rata-rata		212.539.250,-	212.410.000,-	99,93

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan adalah Rp. 212.410.000,- dari target Rp. 212.539.250,- atau sebesar 99,93%.

Tabel 3.10

**Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,2	7,2	100	7,27	7,27	100
2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	45	34,47	78,58	48	54,64	113,83
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	93,35	83,37	89,30	91,02	81,94	90,02
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	78,77	58,81	74,66	71,62	55,83	77,95
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	45	35,36	76,61	46	57,02	123,96

6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	105	104,25	99,28	105	94,29	89,80
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98,55	86,57	87,84	99	78,34	79,13
8	Angka Melek Huruf	%	98,18	95,92	96,97	98,88	98,81	99,93
9	Penurunan Angka Buta Huruf	%	1,82	0,85	85	1	2,89	289
10	Angka melanjutkan pendidikan ke SD	%	100	100	100	100	100	100
11	Angka melanjutkan pendidikan ke SMP	%	98,62	99,80	101,20	97,59	97,59	100
12	Angka kelulusan SD/MI	%	99,96	100	100,01	99,99	100	100,01
13	Angka kelulusan SMP/MTs	%	98,89	99,77	100,01	98,07	100	101,97
14	Guru yang memenuhi kelulusan S1	%	90,45	71,30	78,83	95	83,86	88,27
15	Persentase sarana prasarana pendidikan SD	%	37,04	46,97	126,81	59,01	60,24	102,08
16	Persentase sarana prasarana pendidikan SMP kondisi baik	%	20,95	26,76	90,13	20,95	70,02	334,22
Rata-rata					92,82			124,38

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 16 indikator sasaran **Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan**, 6 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 124,38 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 92,82 %, dan termasuk kategori **baik sekali**. Nilai realisasi capaian ini diperoleh dari :

1. Nilai Realisasi rata-rata Lama Sekolah dan APK serta APM PAUD mencapai target karena upaya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dalam mendorong ketersediaan layanan pendidikan yang makin luas khususnya pada pendidikan anak usia dini. Capaian APK PAUD sebesar 57,02% menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah pada PAUD belum cukup umur atau melebihi umur yang seharusnya. Sedangkan APM PUAD dengan realisasi sebesar 54,64%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah PAUD bersekolah belum tepat waktu sehingga pemerintah perlu melakukan pendampingan/ sosialisasi terhadap pentingnya program PAUD bagi masyarakat.
2. Persentase penurunan angka buta huruf melebihi target disebabkan karena :
 - Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat memperhatikan kualitas pendidikan non formal merupakan salah satu sasaran strategis untuk meningkatkan angka melek huruf yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

- Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 angka melek huruf adalah 98,81 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 angka melek huruf 95,92 hal ini menunjukkan ada peningkatan melek huruf atau ada penurunan angka buta huruf sebanyak 2,89% dari target 1 %.
3. Angka melanjutkan Pendidikan, nilai realisasi mencapai target karena untuk jenjang SD realisasi mencapai target karena siswa yang ada di TK/PAUD melanjutkan ke jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk SMP dan SMA menunjukkan bahwa adanya siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA di luar Kabupaten Flores Timur. Sehingga solusinya Pemerintah menerapkan program beasiswa atau bantuan siswa miskin.
 4. Angka pendidikan yang ditamatkan
 - Untuk jenjang SD realisasi mencapai target karena semua siswa SD menamatkan pendidikannya 100%.
 - Untuk jenjang pendidikan SMP mencapai target karena semua siswa SMP menamatkan pendidikannya 100%.
 5. Angka Kelulusan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang mampu menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang tertentu, indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya makin baik. Idealnya = 100% berarti semua siswa tingkat tinggi dapat menyelesaikan pendidikannya (lulus). Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk jenjang SD realisasi angka kelulusan sebesar 100% dari target 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun pelajaran 2020 tidak ada siswa jenjang SD yang tidak lulus. Sedangkan untuk jenjang SMP realisasi angka kelulusan sebesar 100% dari target 98,07% melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun pelajaran 2020 tidak ada siswa jenjang SMP yang tidak lulus.
 6. Guru yang memenuhi kelulusan S1, dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi tidak mencapai target atau persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 realisasinya sebesar 83,86%, dikarenakan kurangnya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Flores Timur sehingga usaha tenaga pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi mendapat kendala yang cukup berat khususnya biaya pendidikan. Sehingga solusinya perlu adanya program beasiswa untuk peningkatan kualifikasi Guru baik jenjang SD maupun jenjang SMP.

7. Persentase sarana prasarana pendidikan (SD,SMP) dalam kondisi baik
 - a. Bangunan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik. Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur makin besar nilai pada kondisi baik atau makin kecil nilai pada kondisi rusak berarti makin baik. Manfaatnya untuk mengetahui kondisi ruang kelas sehingga dapat ditentukan prioritas pemeliharaan sekolah. Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi sekolah SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Flores Timur sebesar 60,24% dari target 59,01%. Hal ini menunjukkan bahwa ada penambahan kondisi bangunan baik sekolah SD/MI tahun 2020. Diharapkan agar selain DAK dapat digunakan DAU agar target di tahun mendatang dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan.
 - b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik. Indikator ini mengukur makin besar nilai pada kondisi baik atau makin kecil nilai pada kondisi rusak berarti makin baik. Manfaatnya untuk mengetahui kondisi ruang kelas sehingga dapat ditentukan prioritas pemeliharaan sekolah. Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Flores Timur sebesar 70,02% dari target 20,95%.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung penyusunan program dan kegiatan serta pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2020
3. Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah – sekolah penerima manfaat.
4. Terlambatnya proses pengadaan barang / jasa yang bersumber dari DAK untuk pengadaan peralatan pembelajaran dan peralatan pendidikan lainnya karena keterlambatan penetapan barang maupun penyedia pada sistem tersebut.
5. Penyelesaian sejumlah paket pekerjaan tidak tepat waktu.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS baik Satdik Negeri dan Swasta belum tertib dan tepat waktu
7. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

8. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur SKPD dinas PKO (aspek jumlah, pendidikan, disiplin dan kinerja).
9. Pengendalian dan pengawasan internal SKPD belum maksimal.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengalokasian anggaran dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi [pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai kalender kerja tahunan yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS.
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara intern.
6. Menegakan integritas nilai etika dan praktik pembinaan sumber daya manusia melalui penyusunan dan penyerapan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, serta tindak disiplin yang tepat.

Tabel 3.11

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.086.238.900,-	4.952.863.900,-	97,38
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	73.540.947.925,-	60.499.463.586,-	82,27
3	Program Pendidikan Non Formal	673.438.750,-	608.077.300,-	90,29
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	15.392.050,-	15.392.050,-	100
Rata-rata		79.316.017.625,-	66.075.796.836,-	83,30

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan adalah Rp. 66.075.796.836,- dari target Rp. 79.316.017.625,- atau sebesar 83.30%.

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,40	65,10	98,04	66,70	65,20	97,75
2	Angka Kematian Bayi	%	19/1000 KLH	15,5/1000 KLH	128,87	18/1000 KLH	9,8/1000 KLH	145
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	130/100.000 KLH	70,56/100.000 KLH	63,35	120/100.000 KLH	121,59/100.000 KLH	98,67
4	Angka Gizi Buruk	%	0,4	0,5	80	0,3	0,1	166,67
5	Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	95	95,5	100,5	100	0	0
6	Cakupan Pelayanan Usia Produktif	%	50	21,9	43,8	70	43	61,43
7	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	Kasus	78	69,09	88,79	1.077	275	25,53
8	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	Kasus	42	33,87	99,6	40.251	9.317	23,15
9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	100	99,6	99,6	100	99,4	99,40
10	Penemuan Penderita Baru Penyakit TB – BTA+	%	89	8,02	10,13	90	19,9	22,11
11	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	65	61,8	95,08	100	100	100
13	Cakupan Peserta KB Aktif	%	55	45,36	90,72	68	52	76,47
14	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	%	-	-	-	88	88	100
Rata-rata					62,25			79,72

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 indikator sasaran **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, ada 5 indikator yang mendukung sasaran sudah mencapai target, dan 9 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 79,72 % mengalami peningkatan jika

dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 62,25 %, dengan kategori **Baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Usia Harapan Hidup dengan capaian realisasi 65,2 Tahun dimana masih belum mencapai target 66,7 Tahun.
2. Semakin kecil Angka Kematian Bayi, maka dapat dikatakan capaian kinerja semakin tinggi atau berhasil. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pencapaian dibawah target yang ditetapkan yaitu 9,8/1.000 KLH dari 18/1.000 KLH dengan jumlah kematian bayi 36 orang dari 4.252 KLH. Indikator-indikator pendukung yang mempengaruhi pencapaian target AKB ini seperti cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 100%, cakupan kunjungan neonatal 100%, dan cakupan kunjungan bayi hanya 61,3%. Walaupun memiliki capaian 145% namun jumlah kematian bayi masih cukup tinggi sehingga perlu berbagai upaya seperti melakukan pemeriksaan bayi/ neonatus yang lebih berkualitas pada saat kunjungan neonatal dan kunjungan bayi.
3. Angka Kematian Ibu (AKI), hasil yang diperoleh dalam tahun 2020, belum tercapai dimana capaian angka kematian ibu yaitu 121/100.000 KLH dari target 120/100.000 KLH dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang. Penyebab kematian ibu masih saja terjadi dapat dilihat dari indikator-indikator yang mendukung pencapaian AKI seperti pelaksanaan ANC yang terlihat dari indikator cakupan kunjungan ibu hamil (K4) yang tidak semua dilakukan dengan pencapaian 76,6% dari target. Dari 4.470 ibu hamil yang ada di Kabupaten Flores Timur hanya 3.424 ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 ke Fasilitas Kesehatan.
4. Pada Kasus Gizi Buruk untuk tahun 2020 penemuan kasus sebanyak 583 balita atau 3% dari 19.172 balita yang ditimbang. Dengan intervensi selama tahun 2020 maka keadaan Desember 2020 kasus gizi menurun menjadi 90 balita (0,2%) melebihi target yang ditetapkan sebanyak 0,3%). Indikator Gizi lainnya seperti Prevalensi Stunting capaiannya juga melebihi target sedangkan Prevalensi kekurangan Gizi masih dibawa target. Semakin baiknya pencapaian masalah gizi dipengaruhi oleh indikator-indikator pendukung yang juga semakin baik capaiannya seperti cakupan balita ditimbang di posyandu mencapai 92,88%, bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) 81,9%, dan cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 82,3%. Selain itu faktor yang mendukung adalah pemberian makanan tambahan kepada bayi/balita stunting dalam program Gerobak Cinta.

5. Cakupan penanganan penyakit menular seperti penemuan penderita baru TB BTA (+) pencapaiannya masih jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu 19,9% dari target 90% dengan jumlah kasus yang ditemukan 166 Kasus dari perkiraan 833 Kasus. Semua Kasus yang ditemukan diobati 100%. Walaupun demikian, pada indikator angka keberhasilan pengobatan penderita baru TB BTA (+) baru mencapai 37,4% dengan kesembuhan 10,4%. Sedangkan sisa penderita masih dalam proses pengobatan. Indikator presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan HIV sesuai standar pencapaiannya 60% dari target 100% dimana dari 6.385 sasaran pada beberapa kelompok resiko baru terdapat 3.830 sasaran yang dilayani. Sedangkan pada indikator kasus HIV yang diobati capaiannya baru 63,20% dari target 90%. 146 orang yang diobati dari 231 Kasus HIV. Untuk penyakit kasus menular lainnya seperti pada indikator DBD yang ditangani capaiannya 100% dimana semua kasus DBD yang ditemukan semuanya ditangani. Indikator untuk penyakit malaria yaitu API (Annual Parasit Insiden) pencapaiannya sudah sesuai target dimana hasilnya kurang dari 1 (>1)) atau 0,04 dengan jumlah kasus sebanyak 13 kasus. Pada indikator imunisasi yang mendukung pengendalian penyakit menular, pada indikator anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap capaiannya masih dibawah target yaitu 84,1% dari 95%. Jumlah bayi yang diimunisasi lengkap sampai pada imunisasi campak di tahun 2020 adalah 4,374 bayi.
6. Cakupan penyakit tidak menular seperti pada indikator prevelensi tekanan darah tinggi capaian 21,4% dari target 20%. Ini berarti capaiannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan dengan jumlah penderita hipertensi 8.362 dari perkiraan 38.989 jiwa. Diharapkan jumlah hipertensi bisa terus menurun di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk diabetes melitus, pencapaiannya sudah melebihi target yaitu 74,1% dari 70% dengan jumlah kasus 766 jiwa dari perkiraan 1.034 Jiwa. Pada indikator perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara dengan melakukan pemeriksaan capaian masih jauh dibawah target yaitu 12,73% dari target 60%. Untuk pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah melebihi target yaitu 82,9% dari target 65%. Di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 terdapat 228 sasaran ODGJ berat dan yang terlayani sudah 189 orang.
7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin mencapai target 100%, dimana pasien rujukan semuanya ditangani oleh Rumah Sakit dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

8. Cakupan Peserta KB Aktif tidak mencapai target dimana dari target 68%, realisasi sebesar 52%. Sehingga diperlukan tindak lanjut guna pencapaian target dimaksud antara lain memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan program KB, mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi dan penambahan tenaga lini lapangan.
9. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 88%.

Tabel 3.13

**Jumlah Tenaga dan Jenis Tenaga Kesehatan
Tahun 2020**

No	Jenis Tenaga	Standar	Riil	Gab
1	Dokter Spesialis	-	-	-
2	Dokter Umum	29	23	- 6
3	Dokter Gigi	21	2	-20
4	Perawat	278	364	+18
5	Bidan	296	383	+16
6	Perawat Gigi	21	26	+5
7	Apoteker	8	13	-1
8	Akademi Farmasi	21	36	+4
9	Sarjana Kesehatan Masyarakat	21	61	+9
10	Sanitaria	61	69	-1
11	Gizi	66	28	-35
12	Analisis	21	59	+4
13	Keterampilan Fisik	21	6	-14
14	Ketekniksian Medis	21	1	-20
15	Perekam Medis	21	6	-15
16	Tenaga lainnya	41	66	-18
Jumlah		947	1.145	-

Adapun berbagai hambatan dan masalah yang di temukan antara lain :

1. Jumlah tenaga yang belum memadai terutama pada daerah yang sulit dijangkau
2. Faktor perilaku masyarakat yang tidak serta merta mengikuti semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan
3. Kurangnya alokasi anggaran sehingga banyak hal yang direncanakan tidak terakomodir dalam anggaran

Terkait masalah di atas solusi pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah :

1. Menambah tenaga kesehatan terutama tenaga dokter dan alih gizi dan pemerataan tenaga kesehatan khususnya pada daerah yang sulit dijangkau
2. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan maupun media cetak dan elektronik
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor mulai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta efektifitas anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Tabel 3.14

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	4.901.451.036,-	4.724.650.656,-	96,39
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	56.373.771.313,-	52.073.200.694,-	92,37
3	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	159.328.000,-	147.517.000,-	94,74
4	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.453.973.292,-	1.373.864.250,-	94,49
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.411.487.400,-	2.401.099.900,-	99,57
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.575.128.435,-	1.575.128.435,-	96,58
7	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.255.851.018,-	7.676.279.557,-	91,87
8	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	585.826.386,-	585.778.886,-	99,99
9	Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan <i>Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan</i>	218.100.000,-	160.453.551,-	73,57

10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.294.608.449,-	1.284.236.759,-	99,20
11	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	7.157.977.478,-	6.416.862.397,-	89,65
12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	57.394.306.813,-	25.752.022.796,-	44,87
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	324.014.499,-	323.439.499	99,82
Rata-rata		134.781.809.620,-	97.661.928.922,-	72,45

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah Rp. 97.661.928.922,- dari target Rp. 134.781.809.620,- atau sebesar 72,45%.

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ditangani	%	27.739	28.183	101	6,25	3,2	51,20
Rata-rata					101			51,20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial**, 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 51,20 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101 %, dengan kategori **Kurang**. Berdasarkan hasil evaluasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial masih jauh dari target yang ditentukan, dari target 6,25% hasil yang diperoleh di tahun 2020 sebesar 3,2%. Hal ini disebabkan karena pemuktahiran data PMKS belum dilakukan sehingga data PMKS untuk pembandingan masih menggunakan data

tahun-tahun sebelumnya. Beberapa PMKS yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2020 antara lain Fakir Miskin termasuk dalam keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 11.639 KPM, yang juga mendapatkan program komplementer lainnya yaitu program sembako sebesar 16.431 KPM, dan yang di berdayakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 96 KUBE. Selain itu, tidak tercapainya target juga di sebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga beberapa PMKS yang tertangani ditahun 2020 antara lain fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, dan lanjut usai (LANSIA).

Tabel 3.16

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 6

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.507.841.700,-	1.505.519.500,-	99,85
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	779.520.550,-	777.338.200,-	99,72
3	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	67.352.900,-	67.312.900	99,39
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.506.303.900,-	1.485.747.600,-	98,64
Rata-rata		3.861.019.050,-	3.835.918.200,-	99,34

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Rp. 3.835.918.200,- dari target Rp. 3.861.019.050,- atau sebesar 99,34%.

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan
Terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Politik	%	41,39	19	45,90	41,94	27,5	65,57
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47	13	28	65	29	44,62
3	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	-	-	-	20	20	100
Rata-rata					36,95			70,06

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**, 1 indikator sasaran mencapai target sedangkan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 70,06%, dengan kategori **cukup**. Tidak mencapai target dikarenakan :

1. Belum adanya sistem data base yang valid khususnya untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Minimnya anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan.

Solusi :

1. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)
2. Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.18

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 7

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	66.704.800,-	35.979.800,-	98,02
2	Program pelayanan kontrasepsi	185.559.000,-	182.250.000,-	98,21
Rata-rata		252.263.800,-	218.226.800,-	98,11

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak adalah Rp. 218.226.800,- dari target Rp. 252.263.800,- atau sebesar 98,11%.

Misi 2: Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

Diukur melalui 6 sasaran dengan 17 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.19

Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatkan Kinerja Transportasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik	Unit	-	-	-	2	2	100
2	Pengujian Angkutan Umum Laik Jalan	Kali	-	-	-	630	0	0
3	Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Unit	-	-	-	10	0	0
4	Dokumen Izin Trayek	Dok	-	-	-	35	2	5,71
Rata-rata					-			26,42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Kinerja Transportasi**, 3 indikator sasaran tidak mencapai target dan 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 26,42 % dengan kategori **kurang**. Nilai ini diperoleh dari :

1. Prasarana Transportasi dalam Kondisi baik, realisasi indikator sasaran mencapai target 100% diperoleh dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal / pelabuhan. Kegiatan ini dilakukan di jembatan tambatan perahu Lamawalang dan terminal Weri. Selain itu Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang perhubungan laut dan penyebrangan yaitu pengelolaan pelabuhan penyeberangan Deri dan Lohayong dengan dukungan Anggaran sebesar Rp. 35.969.450,- dengan realisasi Rp. 35.969.000,- atau capainya 99%
2. Pengujian Angkutan Umum Laik Jalan pada tahun 2020 tidak mencapai target, dikarenakan regulasi baru terkait PM 133 tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang di keluarkan oleh Kementerian Perhubungan menghendaki setiap wilayah yang melakukan uji kendaraan harus menggunakan Alat Uji Mekanik sehingga kegiatan uji kir untuk kendaraan tidak dilakukan. Hal ini sangat mempengaruhi target pendapatan.
3. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan sehinga terciptanya keamanan, kenyamanan sarana transportasi dan pencegahan terhadap kecelakaan pada tahun 2020 jumlah pengadaan lampu penerangan jalan yang diadakan dengan target sebanyak 12 unit dengan realisasi capaiannya 0. Kegiatan ini adalah dana DAK yang tidak dapat dilaksanakan karena ditarik kembali oleh kementerian perhubungan akibat pandemi Covide-19. Sehingga kegiatan hanya dilaksanakan Konsultan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 35.329.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.329.000,- atau 100%.
4. Dokumen Izin Trayek, realisasi sasaran pada tahun 2020 sebesar 5.71 % dari target 35 dokumen izin Trayek. Hal yang menyebabkan pencapaian sangat minim adalah:
 - a) Adanya peralihan sistem pengaturan pemberian ijin trayek dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 yang mewajibkan setiap kendaraan angkutan umum harus berbadan hukum PT/Koperasi/BUMN/BUMD.
 - b) Dampak ikutan dari pada tidak dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor. Pada prinsipnya kendaraan yang memiliki Izin Trayek

harus laik jalan yang melalui proses pemeriksaan berkala kendaraan dengan masa aktif yang tertera dalam buku uji kendaraan.

Tabel 3.20

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 8

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	35.969.450,-	35.500.000,-	98,68
2	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas	62.279.187,-	61.829.187,-	99,27
3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	220.297.000,-	220.162.100,-	99,93
4	Peningkatan Pelayanan Angkutan	127.423.500,-	127.194.500,-	99,82
Rata-rata		445.969.137,-	444.685.784,-	99,71

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kinerja Transportasi adalah Rp. 444.685.784,- dari target Rp. 445.969.137,- atau sebesar 99,71%.

Tabel 3.21

Analisis Pencapaian Sasaran 9
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung
Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,39	38,73	99,30	0,41	0,42	102,44
2	Akses Air Minum Aman	%	85	100	117	100	100	100
3	Daerah Mata Air yang dikonservasi	Lokasi	-	-	-	10	11	110
Rata-rata					72,1			104,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran **Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya**, 3 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 104,15% dengan kategori **baik sekali**. Nilai ini meningkat

dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,1%. Nilai realisasi tahun 2020 ini diperoleh dari :

1. Rasio jaringan irigasi, nilai realisasi diperoleh dari jumlah pengembangan jaringan irigasi sebesar 2237,75 M¹. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya luas areal potensial sebesar 372 Ha.
2. Akses Air minum aman, realisasi indikator sasaran pada tahun 2020 sebesar 100%, dimana terlaksananya pembangunan 61810,00M¹ jaringan air bersih/air minum yang tersebar dan menjangkau pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Daerah Mata Air yang dikonservasi, nilai realisasi mencapai 110% dimana dari target 10 lokasi terealisasi 11 lokasi mata air yang dipantau kualitas air. 11 Lokasi tersebut antara lain :

- 1) Mata air waiklate – Desa Riangkemie, Kec. Ile Mandiri
- 2) Mata air wairang – Desa Riangkemie, Kec. Ile Mandiri
- 3) Mata air waibawa – Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga
- 4) Mata air waidoko – Desa Bama, kec. Demon Pagong
- 5) Mata air leto matan – Desa Blepanawa, Kec. Demon Pagong
- 6) Mata air liwun ue – Desa Boru Kedang, Kec. Wulanggitang
- 7) Sumur bor – Desa Lewokeleng, Kec. Ile Boleng
- 8) Mata air wailawu – Desa Puhu, Kec. Adonara Timur
- 9) Mata air wai kenawe – Desa Horowura, Kec. Adonara Tengah
- 10) Mata air waibelen – Desa Lewobelen, Kec. Lewolema
- 11) DAS Konga (Hulu, Tengah, Hilir) – Desa Konga, Kec. Titehena

Pencapaian diatas tidak luput pula dari hambatan/kendala yang dihadapi. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian mengenai kesesuaian antara Renstra, Tapkin dan data untuk penyusunan LKIP.
2. Ada beberapa kegiatan yang gagal lelang karena kurangnya penyedia barang dan jasa.
3. Kurang memperhatikan yang bersifat urgenitas akan Paket dari pada Program Kegiatan.
4. Kurang Efesiensi dan efektivitas dalam proses kinerja.
5. Masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Keterbatasan Sumber daya manusia
7. Keterbatasan alokasi Dana

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diperlukan upaya-upaya untuk mendapatkan solusi diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan data yang melibatkan Elemen - elemen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan . Selanjutnya kedepan perlu diadakan persamaan persepsi melalui peningkatan pemahaman seluruh bidang mengenai akuntabilitas kinerja terutama LKIP.
2. Seluruh kegiatan proses pelelangan dipercepat terutama untuk pelelangan penyedia Konsultasi Perencanaan.
3. Skala Prioritas yang bersifat urgenitas akan Paket daripada Program Kegiatan.
4. Efisiensi dan efektivitas di utamakan dalam proses kinerja.
5. Meminimalisir masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Menggali potensi sumber dana sebagai Pendapatan
7. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.22

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 9

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	4.179.429.717,-	3.717.337.870,-	89,94
2	Program pengembangan air minum dan sanitasi	2.210.015.940,-	2.210.015.940,-	100
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	9.777.787,-	9.717.500,-	99,38
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.212.188.300,-	1.203.030.300,-	99,24
Rata-rata		7.611.411.744,-	7.140.101.610,-	93,80

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya di tahun 2020 adalah Rp. 7.611.411.744,- dari target Rp. 7.140.101.610,- atau sebesar 93,80 %.

Tabel 3.23

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Mengurangi Resiko Akibat Bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun	%	76,49	100	103	100	100	100
Rata-rata					103			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam**, 1 Indikator Sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Kegiatan Pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir dengan output terbangunnya talud banjir sepanjang 82M¹ yang berdampak pada keamanan 3276 jiwa.
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana pengaman pantai dengan output terbangunnya talud pengaman pantai sepanjang 886,7 M¹ yang berdampak pada keamanan 8.898 orang yang berdomisili di pesisir pantai.
3. Kegiatan Pembangunan Prasarana pengaman pantai dengan output terbangunnya talud pengaman permukiman sepanjang 140,3 M¹ yang berdampak pada keamanan 1.714 orang.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi dimana Pekerjaan Fisik Pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mana dari 9 (Sembilan) paket pekerjaan baru dua paket yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2020 sementara yang tujuh paket lainnya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, disamping itu juga kegagalan tersebut disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mengerus semua anggaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi Pra Bencana, Saat Bencana Dan Pasca Bencana Yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Untuk itu diharapkan agar seluruh faktor penunjang bisa terpenuhi sehingga kinerja semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.24

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 10

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengendalian banjir	3.066.438.300,-	2.894.579.336	94,39
Rata-rata		3.066.438.300,-	2.894.579.336,-	94,39

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam di tahun 2020 adalah Rp. 2.894.579.336,- dari target Rp. 3.066.438.300,- atau sebesar 94,39 %.

Tabel 3.25

Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	-	-	-	154	168	109,9
2	Rehabilitasi lahan kritis	Ha	-	-	-	8	9,8	122,50
Rata-rata					-			116,20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**, 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 116,20 % dengan kategori **baik sekali**. Nilai ini diperoleh dari :

- Selama tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan ijin lingkungan sebanyak 168 dokumen yang terdiri dari 156 dokumen SPPL dan 12 dokumen UKL-UPL. Capaian indikator kinerja sasaran adalah 168 usaha/kegiatan dari 154 usaha/kegiatan yang ditargetkan, sehingga presentase capaian sebesar 109,1%. Adapun 168 rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha perorangan, kelompok ataupun lembaga antara lain :
 - Kelayakan Lingkungan UKL-UPL (12 rekomendasi) :
 - PT. Litin prima Pratama (APMS SPBU Kompak) - Kec. Wotan Ulumado

- PT. Garam Tobi Hoda Permai (Tambak Garam) – Kec. Adonara
- PT. Ile Mandiri (Biro Perjalanan Wisata) – Kec. Larantuka
- Bumdes Surya Nusa (Tambak Garam) – Kec. Tanjung Bunga
- PT. Rajdular Brothers (Penimbunan Hasil Komoditi Pertanian dan Perkebunan), - Kec. Sarotari Tengah
- Cut and Fill (Pematangan Lahan) – Kec. Larantuka
- PT. Mandiri Konstruksi (Penggilangan Batu dan Industri Pengolahan Aspal) Kec. Adonara Barat
- PT. Mandiri Konstruksi (Penambangan Material Pasir dan Batu) Kec. Adonara Barat
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) – Kec. Ile Mandiri
- PT. Rerolaran (Perkebunan Kopi dan Pengolahan Kopi)- Kec. Wulanggitang
- Incenerator RSUD – Kec. Larantuka
- Fortuna (Hotel dan Restoran) – Kec. Larantuka

2) Kelayakan Lingkungan SPPL (156 rekomendasi) yang terdiri dari :

- Pangkalan Minyak Tanah : 89 rekomendasi
- Warung Makan : 9 rekomendasi
- Apotek : 2 rekomendasi
- Pengepul Ikan : 3 rekomendasi
- Penyediaan air bersih dan MCK : 1 rekomendasi
- Pengolahan Pasca Panen Sorgum : 1 rekomendasi
- Penyalur BBM : 14 rekomendasi
- Bengkel dan Penjualan Spare Part : 3 rekomendasi
- Kantor Kelistrikan PT. PLN Persero ULP Adonara Timur : 1 rekomendasi
- Rental Komputer dan Sablon : 1 rekomendasi
- Foto Copy, ATK, Hard Private Komputer : 1 rekomendasi
- Bengkel Kayu/Meubeler : 1 rekomendasi
- Bengkel Motor : 2 rekomendasi
- Penanganan Infrastruktur di Kawasan Kumuh : 15 rekomendasi
- Kos – kosan : 1 rekomendasi
- Pengolahan Buah : 1 rekomendasi
- Perdagangan Kayu dan Bengkel Kayu : 2 rekomendasi
- Depot Isi Ulang Air Minum : 3 rekomendasi
- Pengolahan Madu Hutan : 1 rekomendasi
- Ternak Kambing Etawa : 1 rekomendasi
- Penampung dan pengiriman barang bekas : 1 rekomendasi

Sesuai dengan capaian sampai tahun 2020, maka total jumlah usaha yang telah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan berjumlah 619 rekomendasi.

2. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada 2 kecamatan untuk 3 lokasi yaitu :
 - 1) Kecamatan Klubagolit sebanyak 7.244 anakan pala yang tersebar pada Desa Hinga luas lahan 2,7 ha untuk 3.622 anakan pala dan Desa Muda pada lahan seluas 2,7 ha dengan 3.622 anakan pala.
 - 2) Kecamatan Wulanggitang dengan jumlah anakan pala 5.428 untuk Desa Hokeng Jaya dengan luas lahan 4,4 ha.

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 yang di targetkan 8 Ha realisasinya sebesar 9,8 Ha atau 122,5 %.

Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan akibat minimnya frekwensi keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis. Sehingga strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah pengembangan sumber daya aparatur teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

Tabel 3.26

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 11

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1.212.188.200,-	1.203.030.300,-	99,24%
2	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	228.267.910,-	227.609.250,-	99,71
Rata-rata		1.440.456.110,-	1.430.639.550,-	99,31

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2020 adalah Rp. 1.430.639.550,- dari target Rp. 1.440.456.110,- atau sebesar 99,31%.

Tabel 3.27

Analisis Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rumah tidak layak huni	Unit	10,12	13,73	135,67	58	58	100
2	Akses limbah domestik Sanitasi layak	Unit	85,00	100	117,64	552	552	100
3	Akses air minum aman	SR	85,00	46,36	54,54	1.092	1.092	100
4	Presentasi Sampah Perkotaan yang ditangani	%			73,28	100	78	78
Rata-rata					95,28			94,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman**, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 94,5 % dengan kategori **baik**. Jika dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,7%. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Rumah tidak layak huni, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target pembangunan BSPS pada Tahun 2020 adalah 58 unit rumah dengan realisasinya 58 Unit dari sumber dana APBD II. Selain itu bantuan swadaya bersumber dari dana APBN Tahap I 200 Unit, APBN Tahap II 200 Unit.
2. Akses limbah domestik Sanitasi layak, nilai realisasi capaian diperoleh dari kegiatan peningkatan pelayanan limbah domestik merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan limbah domestik dengan target 552 Unit dan realisasinya 552 unit.
3. Akses Air minum aman. Nilai realisasi diperoleh dari kegiatan peningkatan pelayanan air bersih merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Flores Timur dengan target 1092 SR dan realisasinya 1092 SR.
4. Persentase Sampah Perkotaan yang ditangani. Total sampah tertimbun selama tahun 2020 sebanyak $\pm 37.857\text{m}^3$ /tahun sedangkan volume sampah yang terangkut/dibuang ke TPA Sampah adalah sebanyak $29.528,46\text{m}^3$. Sehingga

capaian indikator kinerja sasaran sebesar 78 %. Sesuai dengan capaian tersebut, maka sampah yang tidak terangkut sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak $\pm 8.328,54 \text{ m}^3$ (22 %). Jika dibandingkan kinerja penanganan sampah tahun 2019 yang mencapai 73,28% dengan tahun 2020 yang mencapai 78 %, maka terjadi kenaikan sebesar 4,72%. Pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada Kecamatan Larantuka (18 Kelurahan dan 2 desa) dan Kecamatan Adonara Timur (1 Kelurahan).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran persentase penanganan persampahan diantaranya adalah :

- 1) Upaya pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan sehingga semua jenis sampah langsung dibuang ke bak sampah yang menyebabkan volume sampah semakin bertambah setiap hari.
- 2) Minimnya prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah (dump truk dan gerobak motor) dan sering terjadi kerusakan pada kendaraan pengangkut sampah.
- 3) Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan kota masih rendah.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah :

- 1) Berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana pengangkut sampah dalam rangka peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- 2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Tabel 3.28

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 12

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program pengembangan Perumahan	898.709.850,-	898.605.100,-	99,98
2	Program Pelayanan Limbah Domestik	3.037.544.800,-	3.034.768.150,-	99,91
3	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi <i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan Air Bersih</i>	3.613.651.000,-	3.582.500.600,-	99,14

4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	768.770.950,-	768.375.112,-	99,95
Rata-rata		8.318.676.600,-	8.284.248.962	99,58

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman di tahun 2020 adalah Rp. 8.284.248.962,- dari target Rp. 8.318.676.600,- atau sebesar 99,58%.

Tabel 3.29

Analisis Pencapaian Sasaran 13
Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok	4	4	100	2	2	100
2	Cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100	100	100
3	Pemenuhan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan	Lokasi	-	-	-	1	1	100
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran **Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai capaian diperoleh dari :

1. Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, realisasi tercapai 2 dokumen atau 100%. Yang terdiri dari 2 Dokumen Perencanaan yaitu : RKPD Penetapan Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Tahun 2020.
2. Cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang mencapai sasaran ini sebesar 100 % dengan output jumlah Rekomendasi IMB sebesar 100% yang berdampak pada tertatanya kawasan sesuai dengan konsep penataan ruang.
3. Pemenuhan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan yaitu 1 lokasi di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Diharapkan kedepannya akan ada penambahan RTH di kawasan perkotaan.

Tabel 3.30

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 13

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program perencanaan pembangunan daerah	960.227.600,-	871.211.300	90,73
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang <i>Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang</i>	31.005.000,-	31.005.000	100
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	282.971.500,-	280.306.750	99,06
Rata-rata		1.274.204.100,-	1.128.523.050,-	88,56

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota di tahun 2020 adalah Rp. 1.128.523.050,- dari target Rp. 1.274.204.100,- atau sebesar 88,56 %.

Misi 3 : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.31

Analisis Pencapaian Sasaran 14
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tanaman Perkebunan Jambu Mete	Ton	-	-	-	1867	1140	61,06
2	Tanaman perkebunan Tembakau	Kg	-	-	-	800	787	98,38

3	Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Pangan	Ha	-	-	-	110	0	0
4	Luas Lahan Pertanian Yang Dimanfaatkan Untuk Lahan Tanaman Holtikultural	Ha	-	-	-	14	0	0
5	Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan	Ha	-	-	-	570	404,82	71,02
6	Ketersediaan Pangan Energi	Kkap	-	-	-	2.386	3.382	141,74
7	Ketersediaan Pangan Protein	Gr	-	-	-	66.50	78,57	118,15
8	Ketersediaan Pangan Lemak	%	-	-	-	55.00	77,52	140,95
9	Presentasi Konsumsi Pangan	%	78,6	75,3	95,32	75	87,9	117,20
Rata-rata								83,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator kinerja sasaran **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal**, 6 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 83,16% dengan kategori **Baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Tanaman Perkebunan Jambu Mente. Realisasi hasil produksi jambu mente sebesar 1.240 ton, dimana merupakan hasil produksi jambu mente pada 5 Kecamatan utama sasaran Manja Mente tahun 2019 (data statistik Perkebunan tahun 2019). Hasil produksi jambu mente tahun 2020 baru dapat diketahui pada tahun 2021.
2. Tanaman Perkebunan Tembakau. Untuk komoditi tembakau realisasi mencapai 98,3%, dimana lebih diarahkan pada kegiatan pasca panen (Pengolahan Hasil) berupa bantuan peralatan yang mana menggunakan Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DHB-CHT) baik dari APBD II maupun APBD I. Kegiatan difokuskan pada pembinaan dan pendampingan 14 kelompok tani.
3. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Pangan tidak mencapai target. Hambatan yang dihadapi adalah :
 - a. Kondisi iklim dan cuaca yang kurang kondusif seperti terlambatnya turun hujan, angin kencang menimbulkan terganggunya pertumbuhan tanaman baik fase vegetatif maupun generative. Akibatnya produktifitas tanaman menurun. Kondisi hujan juga telah menimbulkan pergeseran musim tanam dari biasanya yang menyebabkan panen akan terjadi pada tahun berikutnya.

- b. Belum adanya penangkar benih yang profesional dalam menyediakan benih unggul dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, membuat rantai penyediaan benih bermutu/bersertifikat menjadi lebih panjang, akibatnya penyediaan benih bisa terlambat karena didatangkan dari luar Flores Timur.
 - c. Terbatasnya sumber daya petani/ kelompok tani spesialis dalam menguasai teknologi budidaya yang dianjurkan.
 - d. Kurangnya fasilitas penyuluh seperti kebun contoh, demplot maupun teknologi spesifikasi lokasi yang ada di tengah masyarakat/petani.
 - e. Adanya bencana non alam nasional (Covid-19) yang mempengaruhi seluruh aktifitas perekonomian dan pengembangan pada berbagai sektor termasuk pertanian yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
 - f. Kurangnya dukungan dana APBD II untuk mendukung kegiatan fisik yang bersumber dari Kementerian Pertanian khususnya Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Hortikultura yang mempengaruhi frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada tingkat lapangan.
4. Luas Lahan Pertanian Yang Dimanfaatkan Untuk Lahan Tanaman Hortikultura. Kegiatan pengembangan hortikultura realisasi tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan, terjadinya refokusing anggaran akibat Covid-19 yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman hortikultura. Namun demikian terdapat pengembangan hortikultura cabe, tomat, mentimun, pare, kangkung, sawi hijau dan kacang panjang di Kabupaten Flores Timur melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN. Selain itu, hambatan lainnya adalah pengembangan tanaman hortikultura belum dilaksanakan secara intensif dan banyak dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan atau belum berorientasi bisnis.
5. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan mencapai 71,02%. Intervensi teknologi untuk pengembangan jambu mente dalam bentuk kegiatan peremajaan, pemangkasan, dan penjarangan tanaman untuk peningkatan produksi dan produktifitas, pencegahan dan pengendalian OPT serta pemanfaatan lokasi sela dengan tanaman lain seperti jagung dan tanaman pangan lainnya. Kegiatan pemeremajaan, pemangkasan dan penjarangan jambu mente tahun 2020 dilaksanakan pada 5 kecamatan Flores Timur Daratan, dan 3 kecamatan wilayah Adonara. Awalnya terget luasan pekerjaan pemangkasan dan penjarangan jambu mente tahun 2020 adalah 800 Ha pada 42 Desa sasaran, namun mengalami perubahan menjadi 480 Ha pada 24 Desa sasaran. Perubahan ini terjadi karena adanya refokusing anggaran karena Pandemi Covide-19. Selain itu, target luas areal pengembangan komoditi perkebunan Kakao, Pala dan

Cengkeh sebesar 90 Ha dengan realisasi sebesar 70 Ha atau 77,78%. Komoditi Jambu mente merupakan komoditi utama, sedangkan pala, cengkeh, tembakau, lada, vanili dan kelor merupakan komoditi pilihan.

6. Data Realisasi Ketersediaan Pangan Energi, Protein, Lemak serta Presentase Konsumsi Pangan melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Khusus Data Konsumsi Pangan diperoleh dari kegiatan survey pola konsumsi pangan ditingkat rumah tangga berupa data Pola Pangan Harapan (PPH).

Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya sasaran antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas sumber daya petani dan kelompok tani dalam menguasai dan menerapkan teknologi berusaha tani secara modern.
2. Kurangnya modal bagi petani untuk menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan
3. Masih terbatasnya aparatur dinas yang berkualifikasi spesialis di bidang pertanian
4. Kurangnya kesadaran petani/keompok tani dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian yang telah dibangun
5. Terbatasnya personil, dana, maupun fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
7. Kondisi iklim dan cuaca seperti angin kencang dan hujan yang tidak menentu telah banyak merugikan petani. Cenderung bergesernya musim tanam telah membuat petani merubah jadwal tanam dan berpotensi mengorbankan benih yang telah disiapkan. Hal ini telah menguras waktu, tenaga dan biaya dari petani dan pihak dinas dalam upaya mengatasinya.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan/bimtek/magang dan demonstrasi penggunaan teknologi berusaha tani secara baik dan benar
2. Bekerja sama dengan mitra usaha petani/peternak seperti koperasi atau bank yang menyediakan paket-paket kredit usaha untuk menambah modal usaha petani/peternak
3. Memperjuangkan tambahan personil teknis yang berkualitas di bidang pertanian
4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek bagi aparatur dinas di bidang pertanian

5. Meningkatkan pemantauan/monitoring dan pembinaan penggunaan prasarana dan sarana bagi petani dan kelompok tani penerima manfaat
6. Memerjuangkan Fasilitas pendukung kegiatan dan biaya operasional dalam memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dinas
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ada di Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan informasi penting tentang cuaca dan memperjuangkan fasilitas pendukung untuk pencatatan data-data cuaca yang di butuhkan.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pertanian secara berjenjang dan bersinergis dari tingkat petani/kelompok tani demi meningkatkan pembangunan pertanian dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan petani pada khususnya serta umumnya masyarakat Flores Timur.

Tabel 3.32

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 14

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.734.147.972,-	1.298.452.506	74,88
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	106.096.175,-	105.943.300,-	99,86
Rata-rata		1.840.244.147,-	1.404.395.806,-	76,31

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokasi tahun 2020 adalah Rp. 1.404.395.806,- dari target Rp. 1.840.244.147,- atau sebesar 76,31%.

Tabel 3.33

Analisis Pencapaian Sasaran 15
Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2018	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2019
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penguatan Sistem Pemasaran	Media	-	-		2	2	100
Rata-rata								100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah**, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100%, dengan kategori **baik**. Penguatan Sistem Pemasaran, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kegiatan Pengambilan data dan Publikasi Informasi Perdagangan melalui 2 Media yaitu media Cetak Flores Pos dan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Adapun hambatan / kendala :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis bidang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari reconfusing anggaran terkait pandemi COVID 19.
2. Dalam melakukan proses pendataan khusus urusan perdagangan petugas seringkali mengalami kendala dimana pihak pelaku usaha yang keberatan memberikan data yang sebenarnya.
3. Masih terbatasnya sarana mobilitas dan sarana penunjang lainnya.

Tabel 3.34

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 15

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri <i>Kegiatan Pengambilan Data dan Publikasi Informasi Perdagangan</i>	44.308.900,-	37.103.900,-	83,74
Rata-rata		44.308.900,-	37.103.900,-	83,74

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah di tahun 2020 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah Rp. 37.103.900,- dari target Rp. 44.308.900,- atau sebesar 83,74 %.

Misi 4 : Selamatkan Laut Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.35

Analisis Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penanganan <i>Illegal Fishing</i> dan <i>destruktive fishing</i>	Kasus	-	-	-	10	10	100
2	Kawasan Konservasi Laut dalam Keadaan Baik (Biota Laut)	Jenis	-	-	-	10	10	100
Rata-rata								100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**, 2 indikator sasaran mencapai target, Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100 %, dengan kategori **baik**. Nilai capaian diperoleh dari :

1. Penanganan *illegal fishing* dan *destruktive fishing*, nilai realisasi diperoleh dari jumlah 10 Kasus yang ditangani dalam gelar operasi pengamanan sumber daya kelautan. Selain itu terdapat 35 Pokmaswas guna peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
2. Kawasan Konservasi Laut Dalam Keadaan Baik, nilai realisasi diperoleh dari jumlah biota laut yang dilindungi sebanyak 10 jenis. Selain itu, dilakukan pembinaan terhadap 92 Pokmaswas dalam pengamanan sumber daya kelautan.

Adapun kendala yang dihadapi, minimnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap dampak negatif akibat penangkapan ikan secara *destructive fishing* dan *illegal fishing*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, meningkatkan peran aktif Pokmas Peduli Lingkungan untuk bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya laut dan perikanan.

Tabel 3.36
Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 16

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	138.643.780,-	137.178.800,-	99,33
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	27.560.000,-	27.285.000,-	99,00
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	27.731.777,-	27,526.300,-	99,26
Rata-rata		193.935.557,-	191.990.100,-	98,99

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut di tahun 2020 adalah Rp. 193.935.557,- dari target Rp. 191.990.100,- atau sebesar 98,99 %.

Tabel 3.37
**Analisis Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Produksi Perikanan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2019
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15.230	15.595	102,6	15,578	15,864	101,84
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	295,6	3,45	11,67	304,6	156	51,72
3	Luas Area Garam	Ha	2	-	0	2,5	-	-
4	Jumlah Produksi Garam	Ton	80	-	0	100	-	-
5	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya	Kelompok	-	-	-	45	50	111,11
Rata-rata					2,85			52,93

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatnya Produksi Perikanan**, 3 indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 52,93 %, dengan kategori **kurang**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

- 1) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap mencapai target dan hal ini sebanding dengan jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat nelayan, dimana pada tahun 2020 terdapat 14 Jenis sarana prasarana penangkapan yang disalurkan.
- 2) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya belum mencapai target, dimana produksi perikanan budidaya mencapai 156 Ton dari target 304,6 Ton atau 54,2%.
- 3) Luas Area Garam dan Jumlah Produksi Garam (ton/tahun), 2 indikator sasaran tidak bisa diukur capaiannya, dikarenakan, masih dalam bentuk usaha rumah tangga (perorangan) dan belum didata secara baik dalam tahun 2020, sehingga luas dan produksi garam belum dapat dirilis oleh Dinas Perikanan. Solusi : pada tahun berikutnya akan dilakukan identifikasi dan pendataan area garam dan produksi garam.
- 4) Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan melebihi target yaitu 50 Kelompok dimana dari target 45 Kelompok perikanan budidaya.

Adapun kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Beberapa pelaku usaha perikanan yang tidak aktif melaksanakan usahanya
2. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
2. Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur maupun Nelayan (penangkapan dan paska penangkapan) serta kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatnya PAD.

Tabel 3.38

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 17

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.070.058.450,-	4.022.061.417,-	98,82
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tangkap	52.956.560,-	52.780.000,-	99,67
Rata-rata		4.123.015.010,-	4.074.841.417,-	98,83

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan adalah Rp. 4.074.841.417,- dari target Rp. 4.123.015.010,- atau sebesar 98,83 %.

Misi 5 : Reformasi Birokrasi

Diukur melalui 2 sasaran dengan 20 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.39

Analisis Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	7	7	100
2	Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	19	19	100	10	10	100
3	Rasio Penduduk yang Ber KTP per satu penduduk	KTP	55000	16917	30,76	20.000	19.291	96,46
4	Rasio Pasangan yang Ber Akta Nikah	Akte	-	-	-	20,36	20,11	98,77
5	Rasio Penduduk yang Ber Akte Kelahiran	%	78290	2399	30,65	35.000	10.976	31,36
6	Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2200	1773	80,59	2300	2070	90,00
7	Pola Pengembangan Karier ASN daerah	Orang	97	92	94,84	206	470	228,16
8	Ketersediaan dokumen Perencanaan	Dok	Ada	Ada	100	Ada	ada	100

9	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada	Ada	100	Ada	ada	100
10	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada	Ada	100	Ada	ada	100
11	Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WTP	-	-
12	OPD yang menerapkan Sisten Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi	OPD	31	31	100	30	30	100
13	Desa Sadar Hukum dan Komunitas	%	12,24	5,24	42,81	15,30	8,73	57,06
14	Jumlah kasus kriminal dimasyarkat	Kasus	51	43	84,31	121	33	27,27
15	Cakupan pelayanan Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100,00
Rata-rata capaian					91,51			88,61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, 8 indikator sasaran tidak mencapai target dan 7 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 88,61 % mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 91,51 % dengan kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

- Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan, mencapai target, dimana terdapat 7 OPD pelaksanaan dengan 6 bidang pelayanan antara lain :
 - Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
 - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- Jumlah OPD yang memiliki SOP, pada tahun 2020 mencapai target, karena melakukan koordinasi dengan baik kepada semua OPD baik melalui surat maupun konsultasi. 10 SOP tersebut antara lain :

- 1) Perbup No 21 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
 - 2) Perbup No 22 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Flores Timur
 - 3) Perbup No 23 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur
 - 4) Perbup No 24 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur
 - 5) Perbup No 41 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur
 - 6) Perbup No 42 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Flores Timur
 - 7) Perbup No 43 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur
 - 8) Perbup No 44 Tahun 2020 tentang SOP AP Dinas Perikanan Kab. Flores Timur
 - 9) Perbup No 45 Tahun 2020 tentang SOP AP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur
 - 10) Perbup No 46 Tahun 2020 tentang SOP AP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur
3. Penduduk Ber-KTP persatuan penduduk terealisasi 19.291 KTP dari target 20.000 KTP atau 96,45. Hal ini sejalan dengan kegiatan Implementasi Sistem Admintrasi Kependudukan yaitu terbangunnya Aplikasi SIAK dan Jaringan Komunikasi Data dari 19 Kecamatan.
 4. Rasio Pasangan Berakta Nikah belum mencapai target dengan realisasi sebesar 89,78% dan Rasio Penduduk yang Ber Akte Kelahiran belum mencapai target dengan realisasi sebesar 31,36%. Sehingga adapun langkah-langkah untuk mengatasi tidak tercapainya target diatas adalah :
 - 1) Pengembangan sistem standarisasi kompetensi aparatur
 - 2) Pengembangan Sistem Pendidikan, Pelatihan Sistem Kerja Nasional (SIAK) yang mengacu pada kebutuhan
 - 3) Perluasan Jaringan (SIAK) sesuai standar nasional maupun regional
 - 4) Penguatan Kelembagaan dalam mendukung operasional pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

- 5) Menyusun, mengembangkan serta sistem jejaring informasi data (Pengembangan Data Base) antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan semua instansi, kecamatan lingkup pemerintah.
 - 6) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penciptaan informasi-informasi publik yang sehat dan mendidik dan berbasis pada penduduk / masyarakat.
 - 7) Melakukan sosialisasi akan pentingnya memiliki NIK sebagai Nomor Kode Akses dalam berurusan dengan instansi pemerintah
 - 8) Menjadikan faktor penduduk sebagai titik sentral pembangunan melalui penyediaan data registrasi yang akurat
 - 9) Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengakomodir hak penduduk dan perlindungan sosial
 - 10) Menciptakan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi melalui komitmen berbagai pihak.
 - 11) Mengelola sistem dan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
 - 12) Diperlukan adanya lembaga UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di tiga wilayah yaitu di Pulau Adonara, Pulau Solor, dan di Kecamatan Wulanggitang untuk memudahkan pelayanan
 - 13) Jumlah personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditambah karena tidak seimbang dengan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada setiap harinya, dan penambahan personil sebagai petugas registrasi yang ditempatkan di kecamatan.
5. Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 2.070 perizinan. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kesadaran masyarakat yang bergerak di bidang usaha dalam pengurusan ijin.
6. Pola Pengembangan karier ASN Daerah, realisasi di tahun 2020 sebesar 228,16 %. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini juga didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain :
- 1) Peningkatan kerjasama dengan pihak Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini para Asesor dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
 - 2) Peningkatan Fasilitas pendukung dalam hal ini peralatan elektronik dan gedung yang layak untuk pelaksanaan seleksi.

7. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
8. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.
9. Penilaian terhadap kinerja Pengelolah Keuangan Daerah Tahun 2020 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga hasil penilaian masih berproses.
10. OPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi mencapai target karena tahun 2020 semua OPD sudah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. Desa Sadar Hukum dan Komunitas tidak mencapai target, dimana dari 35 Desa terealisasi 20 Desa Sadar Hukum dan Komunitas atau 57,5%.
12. Jumlah Kasus Kriminal di Masyarakat sebanyak 33 Kasus dari target 121 Kasus. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik karena berhasil menekan jumlah kasus kriminal dimasyarakat. Langkah-langkah strategis dalam menekan jumlah konflik sosial ini adalah :
 - 1) Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
 - 2) Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan target 3 kali patroli dalam sehari.
 - 3) Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan target 1 orang di setiap RT.
13. Cakupan Pelayanan Korban Bencana belum mencapai target. Adapun Permasalahan yang terjadi :
 - 1) Belum disediakan dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2), sehingga dalam upaya penanganan darurat kebencanaan sering terlambat hanya karena alasan “birokrasi” keuangan;
 - 2) Adanya wabah covid 19 yang merambah secara menggelobal yang membuat roda pemerintahan serta penghidupan masyarakat hampir lumpuh pada semua lini serta penghidupan masyarakat tidak berjalan normal sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Dana/Penganggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dalam hal ini Bantuan Stimulan yang diberikan kepada korban bencana

dipangkukan dalam Dana Tak Terduga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga proses pencairan dana tersebut sampai ke rekening korban harus membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan.

- 4) Dana Hibah yang diturunkan dari pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) pada bulan September 2020 untuk kegiatan fisik Rehabilitasi kerusakan pasca bencana pada tiga kecamatan yaitu talud pengaman pantai pada Desa Watobuku Lamakera Kecamatan Solor Timur, Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka dan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekenderang Kecamatan Tanjung Bunga yang belum habis terealisasi pada Tahun Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021

Sehingga Solusinya antara lain :

- 1) Penanganan darurat bencana untuk sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana yaitu BPBD Kabupaten Flores Timur mengajukan proposal ke BNPB RI terkait kerusakan tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) agar penanganan darurat bencana segera dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi fisik sarana dan prasarana yang rusak.
- 2) Perlunya diterapkan aturan yang baku baik pada lini pemerintahan maupun masyarakat secara umumnya agar kehidupan dalam masa *new normal* semua elemen masyarakat tetap patuh dan taat akan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan bersama dan memperhatikan efek yang diterima apabila protokol kesehatan tidak diterapkan.
- 3) Untuk penanganan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana/pasca bencana, BPBD Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan BNPB RI melalui pengajuan proposal yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak sehingga kehidupan masyarakat di sekitar lokasi akan menjadi nyaman.
- 4) Perlunya disikapi secara cepat dan tepat agar dana hibah yang dipangkukan pada APBD Tahun Anggaran 2020-2021 untuk kegiatan fisik pasca bencana agar segera dilaksanakan tepat waktu guna untuk menjaga normalisasi serta ikatan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tabel 3.40

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 18

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	562.127.788,-	549.080.729,-	97,68
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.365.067.942,-	1.362.297.089,-	99,80
3	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	106.013.750,-	102.464.900,-	96,65
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur <i>Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS</i>	301.368.400,-	295.627.200,-	98,09
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	960.227.600,-	871.211.300,-	90,73
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.292.531.086,-	5.666.904.546,00	90,6
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan <i>Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Desa</i>	35.930.000,0	35.750.000,-	95,50
8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	79.152.100,-	78.302.100,-	98,93
9	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	389.641.000,-	386.613.700,-	99,22
Rata-rata		10.092.059.666,-	9.348.251.564,-	92,62

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah Rp. 9.348.251.564,- dari target Rp. 10.092.059.666,- atau sebesar 92,62 %.

Tabel 3.41

Analisis Pencapaian Sasaran 19
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih
dan Efektif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Desa Sangat Tertinggal	%	27,51	55,55	20,19	0	0	100
2	Desa Tertinggal	%	6,11	68,72	112	56,77	13,10	23,08
3	Desa Berkembang	%	0,87	6,24	717	34,06	77,29	226,92
4	Desa Maju	%	0	0,052	0,025	8,30	9,1	109,64
5	Desa Mandiri	%		1	0,04	0,87	0,43	49,43
Rata-rata					169,85			101,81

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif**, 1 indikator sasaran tidak mencapai target dan 4 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 101,81%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, namun masih dalam kategori **baik sekali**. Semakin sedikit atau kecil jumlah desa sangat tertinggal, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya semakin berhasil. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk Kabupaten Flores Timur tidak terdapat desa sangat tertinggal, terdapat 30 desa tertinggal, 177 desa berkembang, 21 desa maju dan 1 desa mandiri. Untuk Tahun 2020 status desa mengalami peningkatan status desa yang cukup baik terlihat dari angka Desa Tertinggal yang sudah tersisa 30 Desa dari 195 Desa Tertinggal pada awal tahun perencanaan dan Desa sangat Tertinggal dari 1 Desa pada tahun 2019, kini di Tahun 2020 menjadi 0.

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
2. Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.
2. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
3. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
2. Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur pemerintah Desa maupun Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif.

Tabel 3.42

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 19

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	130.005.000,-	129.990.000,-	99,99
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	53.003.325,-	52.903.600,-	99,81
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	272.653.750,-	272.279.650,-	99,86
4	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	191.748.900,-	191.748.900,-	100
Rata-rata		647.410.975,-	646.922.150,-	99,92

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, adalah Rp.646.922.150,- dari target Rp. 647.410.975,- atau sebesar 99,92 %.

3.3

Akuntabilitas Keuangan Permerintah Kab. Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43

Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENDAPATAN	1.114.118.360.584,41	1.063.896.043.160,47	95,49
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.253.713.857,00	48.983.753.693,06	76,23
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.244.589.179,00	9.493.649.173,55	71,68
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	19.801.102.078,00	84,97
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.488.206.825,00	4.788.206.825,21	73,80
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.217.269.453,00	14.900.795.616,30	70,23
1.2	DANA PERIMBANGAN	784.620.182.396,00	777.272.447.989,00	99,06
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	10.340.835.608,00	8.468.765.037,00	81,90
1.2.2	Dana Alokasi Umum	595.654.496.000,00	593.304.944.000,00	99,61
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.624.850.788,00	175.498.738.952,00	98,25
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	265.244.464.331,41	237.639.841.478,41	89,59
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	41.993.695.000,00	61,26
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.222.432.441,41	20.892.743.078,41	94,02
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	174.753.403.400,00	100,16
2	BELANJA	1.154.901.849.280,33	884.508.015.906,50	76,59
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	694.954.801.596,18	509.526.720.849,00	73,32
2.1.1	Belanja Pegawai	408.153.888.861,18	399.995.710.772,00	98,00
2.1.2	Belanja Hibah	14.814.056.695,00	13.643.483.900,00	92,10
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	123.500.000,00	24,70
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	93,72
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	251.978.547.130,00	77.493.802.406,00	30,75
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,-	16.856.638.558,00	93,65
2.2	BELANJA LANGSUNG	459.947.047.684,15	374.981.295.057,50	81,53
2.2.1	Belanja Pegawai	74.410.570.715,00	69.264.593.422,00	93,08

2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.524.101.598,65	182.805.287.649,00	90,71
2.2.3	Belanja Modal	184.012.375.370,50	122.911.413.986,50	66,80
3	PEMBIAYAAN DAERAH	43.783.488.695,92	43.786.038.695,92	100,01
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.783.488.695,92	43.786.038.695,92	100,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.683.488.695,92	43.683.488.695,92	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	102.550.000,00	102,55
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
4.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		40.783.488.695,92	40.786.038.695,92	100,01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	45.420.662.549,89	

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2020 (Sebelum Audit BPK RI)

Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. **1.114.118.360.584,41** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.063.896.043.160,47** atau **95,49%**. Capaian realisasi dari 3 komponen utama pembentuk Pendapatan adalah PAD mencapai 76,23%, Dana Perimbangan dengan realisasi sebesar 99,06% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 89,59%. Pada akun belanja secara total ditargetkan sebesar Rp. **1.154.901.849.280,33** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **884.508.015.906,50** atau 76,59%. Belanja Daerah terdiri dari 2 kelompok yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Secara total Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 694.954.801.596,18,- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 509.526.720.849,00,- atau 73,32%. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator RPJMD. Total Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 459.947.047.684,15,- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 374.981.295.057,50,- atau 81,53%. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan pada OPD berkenaan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 91 indikator sasaran, bahwa 5 indikator sasaran kategori Baik Sekali atau 26,31%, 9 indikator sasaran kategori Baik atau 47,36 %, 1 indikator sasaran dengan kategori Cukup atau 5,26% dan 4 indikator sasaran kategori Kurang atau 21,05%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **89,73 %** dengan kategori **Baik** . Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020 **Baik**.

Namun demikian, dari 91 indikator kinerja terdapat 22 indikator kinerja yang berkategori cukup dan kurang sedangkan ada 3 indikator kinerja yang belum dapat dihitung. (1) Luas Area Garam dan (2) Jumlah Produksi Garam (ton/tahun), kedua Indikator tidak bisa diukur capaiannya, dikarenakan, masih dalam bentuk usaha rumah tangga (perorangan) dan belum didata secara baik dalam tahun 2020, sehingga luas dan produksi garam belum dapat dirilis oleh Dinas Perikanan. (3) Penilaian terhadap kinerja Pengelolah Keuangan Daerah Tahun 2020 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga hasil penilaian belum dipublikasikan.

4.2 Saran Tindak Lanjut

Hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga dapat berorientasi hasil/*outcome* dan memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

2. Menentukan indikator sasaran yang dapat diukur sehingga keberhasilan kinerja daerah dapat diyakini.
3. Perlu dilaksanakannya bimbingan teknik penyusunan indikator kinerja utama pada setiap OPD, dalam proses penyusunan RENSTRA OPD yang merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan OPD sehingga adanya keselarasan disetiap dokumen dan dapat menggambarkan kinerja Daerah sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada.
4. Perlu peningkatan pengendalian, evaluasi dan pemantapan koordinasi serta sistem informasi kinerja yang dapat dipublikasikan tentang kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor dan keterlibatan stakeholders untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan pada semua tingkatan pemerintahan.


BUPATI FLORES TIMUR,
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ile Lewotolok, No. : - Telph. (0383) 21091

L A R A N T U K A

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dimana, reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan secara signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Larantuka, 16 Maret 2021

Inspektur Daerah Kab. Flores Timur,



Mami
Antonius Lebi Rava, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	168	6	4	Kurang
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68	3,09	115,00	Baik Sekali
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik social antar pemuda	Kasus	10	10	100	Baik
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	7,27	100	Baik
		5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	48	54,64	113,83	Baik Sekali
		6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	91,02	81,94	90,02	Baik
		7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	71,62	55,83	77,95	Baik
		8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	57,02	123,96	Baik Sekali
		9) Angka Partisipasi Kasar (APK)SD	%	105	94,29	89, 80	Baik
		10) Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP	%	99	78,34	79,13	Baik
		11) Angka melek huruf	%	98,88	98,81	99,93	Baik
		12) Angka buta huruf	%	1	2,89	289	Baik Sekali
		13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD	%	100	100	100	Baik
		14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP	%	97,59	97,59	100	Baik
		15) Angka kelulusan (AL) SD /MI	%	99,99	100	100,01	Baik Sekali
		16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs	%	98,07	100	101,97	Baik Sekali
		17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	95	83,86	88,27	Baik
		18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	59,01	60,24	102,08	Baik Sekali
		19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	%	20,95	70,02	334,22	Baik Sekali

5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup	Tahun	66,70	65,20	97,75	Baik
		21) Angka Kematian Bayi	%	18/1000	9,8/1000	145	Baik Sekali
		22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	120/100.000	121,59/100.000	98,67	Baik
		23) Angka gizi buruk	%	0,3	0,1	166,67	Baik Sekali
		24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar	%	100	0	0	Kurang
		25) Cakupan pelayanan usia produktif	%	70	43	61,43	Cukup
		26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular	Kasus	1.077	275	25,53	Kurang
		27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular	Kasus	40.251	9.317	23,15	Kurang
		28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	99,4	99,40	Baik
		29) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+	%	90	19,9	22,11	Kurang
		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	Baik
		31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	Baik
		32) Cakupan peserta KB aktif	%	68	52	76,47	Baik
		33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	88	88	100	Baik
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,25	3,2	51,20	Kurang
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik	%	41,94	27,5	65,57	Cukup
		36) Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65	29	44,62	Kurang
		37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20	20	100	Baik
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Unit	2	2	100	Baik
		39) Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	630	0	0	Kurang
		40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	10	0	0	Kurang
		41) Dokumen izin trayek	Dok	35	2	5,71	Kurang
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, social dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi	%	0,41	0,42	102,44	Baik Sekali
		43) Akses air minum aman	%	100	100	100	Baik
		44) Daerah mata air yang dikonservasi	Lokasi	10	11	110	Baik Sekali
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100	100	100	Baik
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	154	168	109,9	Baik Sekali
		47) Rehabilitasi lahan kritis	Ha	8	9,8	122,50	Baik Sekali

12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni	Unit	58	58	100	Baik
		49) Akses limbah domestic sanitasi layak	Unit	552	552	100	Baik
		50) Akses air minum aman	SR	1092	1.092	100	Baik
		51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	100	78	78	Baik
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan	Dok	2	2	100	Baik
		53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100	100	100	Baik
		54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	1	1	100	Baik
14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	55) Tanaman perkebunan Jambu Mete	Ton	1867	1140	61,06	Cukup
		56) Tanaman perkebunan Tembakau	Kg	800	787	98,38	Baik
		57) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan	Ha	110	0	0	Kurang
		58) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura	Ha	14	0	0	Kurang
		59) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	570	404,82	71,02	Cukup
		60) Ketersediaan pangan energi	kkal	2.386	3.382	141,74	Baik Sekali
		61) Ketersediaan Pangan Protein	gr	66.50	78,57	118,15	Baik Sekali
		62) Ketersediaan Pangan Lemak	gr	55.00	77,52	140,95	Baik Sekali
		63) Persentase Konsumsi Pangan	%	75	87,9	117,20	Baik Sekali
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	64) Penguatan sistem pemasaran	Media	2	2	100	Baik
16.	Meningkatnya kelestarian sumber dayahayati laut	65) Penanganan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i>	Kasus	10	10	100	Baik
		66) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Jenis	10	10	100	Baik
17.	Meningkatnya produksi perikanan	67) Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15.578	15,864	101,84	Baik Sekali
		68) Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	304,6	156	51,72	Kurang
		69) Luas Area Garam	Ha	2,5	-	-	-
		70) Jumlah Produksi Garam	Ton	100	-	-	-
		71) Jumlah kelompok budidaya perikanan	Kelompok	45	50	111,11	Baik Sekali

18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	72) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	Baik
		73) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	10	10	100	Baik
		74) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	KTP	20.000	19,291	96,46	Baik
		75) Rasio pasangan berakta nikah	%	20,36	20,11	98,77	Baik
		76) Rasio penduduk berakte kelahiran	Akte	35.000	10,976	31,36	Kurang
		77) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2300	2070	90,00	Baik
		78) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	206	470	228,16	Baik Sekali
		79) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		80) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		81) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		82) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP	-	-	-
		83) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	30	30	100	Baik
		84) Desa Sadar Hukum dan Komunitas	%	15,30	8,73	57,06	Cukup
		85) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	121	33	27,27	Kurang
		86) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100,00	Baik
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	87) Desa sangat tertinggal	%	0	0	100	Baik
		88) Desa tertinggal	%	56,77	13,10	23,08	Kurang
		89) Desa berkembang	%	34,06	77,29	226,92	Baik Sekali
		90) Desa maju	%	8,30	9,1	109,64	Baik Sekali
		91) Desa mandiri	%	0,87	0,43	49,43	Kurang
Rata-Rata Pencapaian Sasaran						89,73	Baik

Larantuka, 29 Maret 2021



BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

LAMPIRAN III



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST
Jabatan : BUPATI FLORES TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Larantuka, 29 Januari 2021

BUPATI FLORES TIMUR



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	168
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	10
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD /MI 16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs 17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	Tahun % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	7,27 48 91,02 71,62 46 105 99 98,88 1 100 97,59 99,99 98,07 95 59,01 20,95
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup 21) Angka Kematian Bayi 22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH) 23) Angka gizi buruk 24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 25) Cakupan pelayanan usia produktif 26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 29) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+	Tahun % % % % % % Kasus Kasus % %	66,70 18/1000 120/100.000 0,3 100 70 1.077 40.251 100 90

		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 32) Cakupan peserta KB aktif 33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	% % % %	100 70 68 88
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,25
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik 36) Partisipasi angkatan kerja perempuan 37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	% % %	41,94 65 20
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik 39) Pengujian Angkutan umum laik jalan 40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 41) Dokumen izin trayek	Unit Kali Unit Dok	2 630 10 35
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi 43) Akses air minum aman 44) Daerah mata air yang dikonservasi	% % Lokasi	0,41 100 10
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 47) Rehabilitasi lahan kritis	Jenis Usaha Ha	154 8
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni 49) Akses limbah domestik sanitasi layak 50) Akses air minum aman 51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	Unit Unit SR %	58 552 1092 100
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan 53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Dok % Lokasi	2 100 1

14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	55) Tanaman perkebunan Jambu Mete	Ton	1867
		56) Tanaman perkebunan Tembakau	Kg	800
		57) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan	Ha	110
		58) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura	Ha	14
		59) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	570
		60) Ketersediaan pangan energi	kkal	2.386 kkal
		61) Ketersediaan Pangan Protein	gr	66.50 gr
		62) Ketersediaan Pangan Lemak	gr	55.00 gr
		63) Persentasi Konsumsi Pangan	%	75
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	64) Penguatan sistem pemasaran	Media	2
16.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	65) Penanganan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i>	Kasus	10
		66) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Jenis	10
17.	Meningkatnya produksi perikanan	67) Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15.578
		68) Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	304,6
		69) Luas Area Garam	Ha	2,5
		70) Jumlah Produksi Garam	Ton	100
		71) Jumlah kelompok budidaya perikanan	Kelompok	45
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	72) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7
		73) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	10
		74) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	KTP	20.000
		75) Rasio pasangan berakta nikah	%	20,36
		76) Rasio penduduk berakte kelahiran	Akte	35.000
		77) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2300
		78) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	206
		79) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	Ada
		80) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada
		81) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda	Dok	Ada
		82) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP
		83) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	30
		84) Desa Sadar Hukum dan Komunitas	%	15,30
		85) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	121
		86) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	87) Desa sangat tertinggal	%	0
		88) Desa tertinggal	%	56,77
		89) Desa berkembang	%	34,06
		90) Desa maju	%	8,30
		91) Desa mandiri	%	0,87

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Orang Muda			
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	257.761.513,-	APBD
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	471.782.000,-	APBD
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1.	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.410.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	42.921.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	361.242.050,-	APBD
4.	Program Transmigrasi Local	17.089.400,-	APBD
Sasaran 3 : Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan			
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal <i>Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual</i>	183.036.250,-	APBD
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional	29.503.000,-	APBD
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.086.238.900,-	APBD
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	73.540.947.925,-	APBD
3.	Program Pendidikan Non Formal	673.438.750,-	APBD
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	15.392.050,-	APBD
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
1.	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	4.901.451.036,-	APBD
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	56.373.771.313,-	APBD
3.	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	159.328.000,-	APBD
4.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.453.973.292,-	APBD
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.411.487.400,-	APBD
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.575.128.435,-	APBD
7.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.255.851.018,-	APBD
8.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	585.826.386,-	APBD
9.	Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan <i>Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan</i>	218.100.000,-	APBD

10.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.294.608.449,-	APBD
11.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	7.157.977.47,-	APBD
12.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	57.394.306.813,-	APBD, DAU, DAK
13.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	324.014.499,-	APBD
Sasaran 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.507.841.700,-	APBD
2.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	779.520.550,-	APBD
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	67.352.900,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.506.303.900,-	APBD
Sasaran 7 : Meningkatkan Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak			
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	66.704.800,-	APBD
2.	Program Pelayanan Kontrasepsi	185.559.000,-	APBD
Sasaran 8 : Meningkatkan Kinerja Transportasi			
1.	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	35.969.450,-	DAU
2.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	62.279.187,-	DAU
3.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	220.297.000,-	APBD
4.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	127.423.500,-	APBD
Sasaran 9 : Meningkatkan Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya			
1.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	4.179.429.717	DAU
2.	Program Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi	2.210.015.940,-	DAU
3.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	9.777.787,-	DAU
4.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.212.188.300	DAU
Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana			
1.	Program Pengendalian Banjir	3.066.438.300,-	DBH
Sasaran 11 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	1.212.188.200,-	DAU
2.	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	228.267.910,-	DAU
Sasaran 12 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman			
1.	Program Pengembangan Perumahan	898.709.850,-	APBD

2.	Program Pelayanan Limbah Domestik	3.034.768.150,-	APBD
3.	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	3.613.651.000,-	APBD
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	768.770.950,-	APBD
Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota			
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	960.227.600,-	APBD
2.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang <i>Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang</i>	31.005.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	282.971.500,-	DAU
Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal			
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.734.147.972,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	106.096.175,-	APBD
Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah			
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri <i>Kegiatan Pengambilan Data Dan Publikasi Informasi Perdagangan</i>	44.308.900,-	APBD
Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut			
1.	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	138.643.780,-	DAU
3.	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	27.560.000,-	DAU
4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	27.731.777,-	DAU
Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan			
1.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.070.058.450,-	DAK, DAU
2.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	52.956.560,-	DAU
Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Program Peningkatan Pelayanan Public	562.127.788,-	APBD
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.365.067.942,-	APBD II, DAK
3.	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	106.013.750,-	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur <i>Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS</i>	301.368.400,-	APBD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	960.227.600,-	APBD
6.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.292.531.086,-	APBD
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan <i>Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Desa</i>	35.930.000,-	APBD
8.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	79.152.100,-	APBD
9.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Penanggulangan	389.641.000,-	APBD

	Bencana		
Sasaran 19 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif			
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	130.005.000,-	APBD
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	53.003.325,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	272.653.750,-	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	191.748.900,-	APBD

Larantuka, 29 Januari 2021

BUPATI FLORES TIMUR,



SANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya PNS OPD, Guru, Pengawas, Pamong Belajar	1. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (PAUD) 2. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (SD) 3. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (SMP)	100 orang 200 orang 150 orang
2.	Meningkatnya kualitas layanan PAUD	Persentase APK, APM PAUD 1. APK PAUD 2. APM PAUD	40% 45%
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	- APK, APM wajib belajar sembilan tahun - APK SD - APM SD - APK SMP - APM SMP - APM Paket C - Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/MI - SMPMTS - Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTS - Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTS - Angka melanjutkan (AM) - Ke SD/MI - Ke SMP/MTS - Fasilitas pendidikan - SD/MI kondisi bangunan baik - SMP/MTS kondisi bangunan baik - Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar - Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar - Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD	105% 85% 90% 60% 90% 5647 siswa 5070 siswa 0,04% 0,20% 100% 100% 100% 97,59% 65% 72% 100% 85% 98%

1	2	3	4
4.	Menurunnya penduduk yang buta huruf	Angka buta huruf	1%
5.	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi	1. Rasio Guru Bersertifikasi/jumlah guru 2. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D IV	39,96% 84,85%
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	40%
7.	Meningkatnya satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100%
2.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi	1. Angka kematian Ibu (per 100.000 KH) 2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 3. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Kebidanan 5. Cakupan Pelayanan Nifas 6. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	110 97 100 100 100 100 100
2.	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi	1. Angka kematian Bayi (per 1.000 KH) 2. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 3. Cakupan pelayanan anak Balita 4. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1) 5. Cakupan kunjungan bayi 6. Angka Gizi Buruk 7. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 8. Prevalensi kekurangan gizi 9. Prevalensi Stunting 10. Cakupan balita yang mendapat KMS 11. Cakupan balita ditimbang di Posyandu	17 100 100 100 100 0,2 100 10 30 100 100

1	2	3	4
		12. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 13. Cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 14. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A 14. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah 15. Presentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 16. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 17. Pelayanan kesehatan usia produktif 18. Cakupan peserta KB Aktif	100 95 100 100 30 45 100 90
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	1. Cakupan Desa Siaga Aktif 2. % Posyandu Pusrnama + mandiri 3. Cak Rumah Tangga Ber PHBS 4. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 5. Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan 6. Persentase Rumah Tangga dengan sumber Air Minum Bersih 7. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat Kesehatan 8. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan 9. Persentase cakupan rumah sehat	74 79 95 220 85 80 80 65 65

1	2	3	4
4.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Tuber Colosis (TB) 2. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis 3. Persentase kesembuhan TB 4. Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita Baru TB BTA (+)/ 5. Persentase Peningkatan Penemuan Penderita Baru TB BTA (+) 6. Persentase penemuan dan pengobatan kasus Pneumonia pada Balita 7. Persentase Demam Berdarah Dengui (DBD) yang ditangani 8. Persentase penurunan kesehatan DBD per 100.000 penduduk 9. Persentase Angka Kematian Rabies Per 10.000 Penduduk 10. Persentase penurunan kesakitan Diare per 1.000 penduduk 11. Persentase penurunan kesakitan Malaria per 1.000 penduduk 12. Annual parasit insiden 13. Persentase penurunan kesakitan kusta per 100.000 penduduk 14. Persentase angka kasus HIV yang diobati 15. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV secara standar 16. Persentase penurunan angka kesakitan filariasis per 10.000 penduduk 17. Prevalensi tekanan darah tinggi	65 100 100 100 95 30 100 0 0 5,8 78 85 15 93 100 95 18

1	2	3	4
		18. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
		19. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	80
5.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Diabetes Melitus 2. Presentae puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 3. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini Kanker Serviks dan Payudara 5. Persentase pelayanan kesehatan terhadap ODGJ 6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 7. Cakupan Desa UCI 8. Persentase sinyal kewaspadaan Dini yang direspon	7 100 100 85 75 100 95 100
6.	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan bagi seluruh Penduduk khususnya Penduduk Miskin	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pembiayaan kesehatan	75

1	2	3	4
7.	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi 2. Cakupan Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Nginap 3. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 4. Penambahan Jumlah Pustu 5. Penambahan Jumlah Pusling 6. Persentase jumlah kasus yang dirujuk 7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Tradisional 8. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan obat di Puskesmas 9. Cakupan ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas	100 0 0 0 0 <5 40 95 80
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Dokter Umum 2. Jumlah Tenaga Dokter Gigi 3. Jumlah Perawat 4. Jumlah Bidan 5. Jumlah Ahli Gizi 6. Jumlah Tenaga Sanitarian 7. Jumlah Apoteker 8. Cakupan Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Formal	38 19 341 340 58 60 17 45
9.	Meningkatnya ketersediaan Mutu Farmasi dan Makanan bagi Masyarakat	Persentase Pengawasan Mutu Obat, ketersediaan Farmasi dan Produk Pangan	80

1	2	3	4
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Tersedianya Jaringan Transportasi Darat yang memadai untuk meningkatkan Daya dukung, Kapasitas dan Kualitas Pelayanan serta Aksesibilitas Wilayah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya ruas jalan dalam kondisi baik pada kecamatan : 1. Kecamatan Eputobi – Leworok – Tuakepa 5 km 2. Kecamatan Baniona – Kawela – Watodei 2 km 3. Kecamatan Lewoggaran – Lebao – Liwo 1,85 km 4. Kecamatan Liewokluo – Galu 1,35 km 5. Kecamatan Lamanabi – Latonliwo – Patisirawalang 3,5 km	
2.	Tersedianya alat angkut yang memadai untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 unit
3.	Terpeliharanya peralatan berat, alat angkutan dan bengkel yang memadai untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah	Terpeliharanya alat- alat berat	14 Unit
4.	Tersedianya bangunan dan jaringan irigasi yang dapat mendukung perluasan areal potensial untuk pembangunan pertanian dan meminimalisir daya rusak air atau banjir, erosi dan abrasi	1. Jumlah saluran sungai/kali yang dinormalisasikan M¹ 2. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi 4 paket 3. Terbangunnya talud banjir 92,18 M¹	
5.	Tersedianya bangunan dan jaringan air bersih yang tersebar dan menjangkau pemenuhan kebutuhan masyarakat	Terbangunnya instalasi air minum / air bersih dan sanitasi yang menjangkau masyarakat	1 paket (2.000 M ¹)
6.	Tertatanya pembangunan perumahan yang layak dan penataan permukiman yang berdimensi tata ruang	1. Tersedianya bahan bakar, minyak/gas dan pelumas bagi kendaraan dinas 1 unit 2. Jumlah dokumen perencanaan tata ruang 1 tauhn 3. Prosentase pengendalian dan pemanfaatan ruang (%) 1 tahun	

1	2	3	4
4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh)Ha	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi 2. Jumlah rumah yang dibangun (koordinasi/konsultasi)	46 rumah 3 lokasi
2.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Jumlah akses ;imban domestik layak yang ditingkatkan 2. Jumlah pelayanan air bersih yang ditingkatkan 3. Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan	581 Unit 1768 SR 2 lokasi
3.	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah pembebasan tanah Pemda	12 bulan
4.	Retribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan	1. Jumlah tanah pemda yang idifasilitasi 2. Jumlah bidang tanah yang difasilitasi 3. Jumlah lokasi yang dilakukan sosialisasi	25 bidang 3 bidang 4 kecamatan
5.	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	1. Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi 2. Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan 3. Jumlah tanah Pemda yang difasilitasi	6 kasus 5 kali 6 kasus

1	2	3	4
5.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengamanan	12 bulan (pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa)
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah penegakan Perda 2. Frekuensi kegiatan dan operasi gabungan 3. Jumlah kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4. Frekuensi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten 5. Frekuensi pengamanan demonstrasi	5 Perda Operasi penertiban aset daerah dan operasi tipiring Perda No.4 tahun 2020 0 9 kecamatan (12 bulan) 12 bulan
3.	Terwujudnya peran serta masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban	Jumlah Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat.Limas)	40 orang 19 kecamatan
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	12 bulan

1	2	3	4
6.	BIDANG SOSIAL		
1.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Jumlah KK warga KAT yang didampingi, jumlah rumah adat yang diberikan bantuan 2. Jumlah KUBE yang diberdayakan 3. Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	3 unit 16 KUBE 16.431 KPM Bansos Pangan
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan 2. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat yang diberdayakan	19 orang 20 karang taruna
3.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Jumlah lansia luar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Jumlah panti/yayasan sosial yang mendapat bantuan 3. Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan 4. Jumlah anak sekolah yang mendapat sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya 5. Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan 6. Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 7. Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) 8. Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS/Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	50 lansia 6 panti 100 penyandang disabilitas 200 siwa/i 40 org eks 25 org disabilitas 3 ODK 25 klien

1	2	3	4
		9. Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan ketrampilan 10. Jumlah dokumen pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 11. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH 12. Jumlah orang yang mendapat pelayanan/bantuan 13. Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	30 orang 1 dokumen 4 kali 2.000 orang 41 orang
4.	Terpeliharanya monumen bersejarah	Terlaksananya pemeliharaan monumen bersejarah	2 lokasi
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
I. BIDANG TENAGA KERJA			
1.	Penempatan tenaga kerja	1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan	1 dokumen 535 orang dan 126 orang
2.	Hubungan industrial	1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84 perusahaan/ Lembaga dan 30 perusahaan 15 kasus

1	2	3	4
		3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	6 dokumen
3.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penguatan infrastruktur soaial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	64 paket
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Jumlah lembaga perempuan dan anak terbina 2. Jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi 3. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	19 lembaga 46 lembaga 20 %
3.	BIDANG PANGAN		
1.	Meningkatkan kapasitas produksi produktifitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	75 poktan
2.	Teratasinya masalah kerawanan pangan dan kerentanan pangan di masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	19 kecamatan
2.	Meningkatnya kemantapan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan konsumsi penduduk setiap waktu pada seluruh wilayah	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan masyarakat :	Skor PPH ketersediaan pangan 72,9%, peta akses pangan, NBM
3.	Meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi dengan pengembangan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi	1. Penyusunan, pemutakhiran dan analisa peta ketahanan pangan dan ketentraman pangan 2. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	250 desa/kelurah anaa 5 pasar utama
4.	Meningkatnya penyerapan pangan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 2. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 paket 19 kelompok wanita tani

1	2	3	4
4.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah 2. Jumlah usaha yang memiliki dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) 3. Jumlah penertiban kegiatan penambanagn tanpa izin (PETI) 4. Terlaksananya pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengembangan taman rekreasi 5. Jumlah sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (alat kebersihan/paket) 6. Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan 7. Jumlah TPA yang dikelola 8. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 9. Jumlah mata air yang dikonservasi (Kec.Solor Barat, Kec. Witihama, Kec.Titehena) 10. Jumlah sumber mata air yang dipantau 11. Jumlah kasus/layanan yang ditindaklanjuti 12. Jumlah usaha yang diawasi 13. Pengadaan alat-alat dan bahan kimia laboratorium, uji profisisensi	1 dokumen 154 usaha/ kegiatan 19 kecamatan 3 lokasi 1 paket 2 kecamatan 1 unit 2 dokumen 5 Ha 10 titk mata air (19 kecamatan) 15 kasus 12 usaha 20 alat/bahan

1	2	3	4
5.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen pendaftaran penduduk	19 kecamatan
2.	Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen pencatatan sipil	19 kecamatan
3.	Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Tersedianya data base penduduk yang valid 2. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan data dan hak akses data penduduk dan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	19 kecamatan 19 kecamatan
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan	51 desa/kelurahan
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	1. Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kelurahan 2. Terlaksananya pendampingan penyusunan RPJM Desa 3. Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa 4. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa 5. Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pelatihan 6. Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa dan BPD	30 desa/kelurahan 229 desa 229 desa 50 orang 231 orang 229 desa

1	2	3	4
		7. Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA) 8. Terselenggaranya evaluasi RKPDes 9. Jumlah BUMDES/BUMDES bersama yang difasilitasi 10. Terfasilitasinya pemilihan dan pelantikan Kepala Desa 11. Desa peserta lomba	229 desa 229 desa 26 unit 118 desa 100 desa
3.	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di pedesaan dalam pembangunan	1. Frekuensi jambore kader posyandu 2. Frekuensi rakor pokjanal posyandu 3. Jumlah kader posyandu 4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan 5. Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 desa 6. Terlaksananya pelatihan kader PKK	2 kali 2 kali 846 138 229 desa 150 orang
4.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	1. Jumlah peserta Bimtek 2. Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi 3. Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/kelurahan	133 orang 193 kelompok 10 desa
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Cakupan peserta KB aktif 2. Cakupan Akseptor baru	68% 70%
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang handal dan terintegrasi	1. Jumlah pelabuhan/terminal pelayanan angkutan sungai danau dan penyebrangan 2. Jumlah/frekuensi pemeriksaan dan pengawasan armada angkutan laut	3 unit 12 kali
2.	Tersedianya fasilitas Tambatan Perahu	1. Jumlah area parkir yang dibangun 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan (fasilitas utama dan pendukung)	1 unit 1 unit

1	2	3	4
3.	Terciptanya keamanan, kenyamanan sarana transportasi laut dan pencegahan terhadap kecelakaan transportasi laut	1. Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 2. Jumlah dokumen data base bidang perhubungan 3. Jumlah ijin angkutan yang dikeluarkan 4. Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan yang dikeluarkan 5. Jumlah frekuensi koordinasi	5 kali 1 dokumen 2 dokumen 35 dokumen 6 kali
4.	Terciptanya kesadaran berlalulintas bagi pengguna jalan	1. Jumlah pembatas jalan/road barrier yang diadakan 2. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan 3. Jumlah lampu penerangan jalan yang diadakan	15 unit 24 unit 10 unit
5.	Meningkatnya kelayakan peralatan pengujian kendaraan bermotor	1. Jumlah peralatan uji yang dipelihara 2. Frekuensi pengujian kendaraan angkutan umum	3 unit 630 kali
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana Bidang Komunikasi dan Informatika yang memadai	Cakupan layanan informasi	100%
2.	Meningkatnya system pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis Teknologi	Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	100%
3.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga IT	Tersedianya Tenaga IT yang berkualitas	100 orang
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
1.	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1. Jumlah koperasi /KUD /UMKM yang dilatih 2. Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	184 koperasi/KUD/ UMKM 65 koperasi
2.	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah kelompok sasaran	10 koperasi
3.	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Sosialisasi sinkronisasi sarasehan lomba asa terampil	16 koperasi
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	16 koperasi

1	2	3	4
5.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKU)	1. Jumlah dokumen data base UKM/UMKM 2. Jumlah wirausaha pemula/baru (UMKM) 3. UMKM yang dilatih	1 dokumen 150 wirausaha baru 30 UMKM
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL		
1.	Jumlah potensi unggulan daerah yang dipromosi	1. Jumlah investor di daerah 2. Jumlah rapat koordinasi investasi daerah 3. Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM Elektrik	1 kali 4 kali 2 kali
2.	Persentase system investasi yang dibangun	1. Memfasilitasi dan koordinasi di bidang Investasi 2. Jumlah sistem pengembangan informasi penanaman modal	12 bulan 12 bulan
3.	Peningkatan pelayanan perizinan	1. Terlaksananya pengurusan Perizinan 2. Terlaksananya sosialisasi Perizinan	12 bulan 19 kecamatan
12.	BIDANG KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA		
1.	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	1. Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi paskibraka 2. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan	100% 100%
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya lanjutan pembangunan stadion olahraga	100%
3.	Pengembangan organisasi keolahragaan	Terlaksananya kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI	100%
4.	Pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pembina pramuka yang mengikuti kursus pembinaan pramuka	100%
13.	BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	Pelestarian kesenian tradisonal	1. jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan tingkat sma/smk/ma 2. jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan (festifal dan seminar)	1 4

1	2	3	4
2.	Pengelolaan kekayaan budaya	1. Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 2. Pembinaan SDM lembaga dan pranata kebudayaan	1 25
3.	Pembinaan sejarah lokal	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1
4.	Pengelolaan cagar budaya	Pengembangan cagar budaya	10 jenis
14.	BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Peningkatan kualitas SDM masyarakat Flores Timur dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat	1. Jumlah SDM perpustakaan desa/kelurahan, sekolah dan komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standar 2. Jumlah tenaga pustakawan sekolah yang mengikuti bimtek perpustakaan 3. Jumlah bahan pustaka yang diantar dan dikelola secara baik 4. Jumlah pemustaka yang mengunjungi/memanfaatkan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan daerah 5. Jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	25 orang 23 orang 1.500 buku 10.000 orang 2 kali
15.	BIDANG KEARSIPAN		
1.	Peningkatan kualitas Akses Pelayanan Kearsipan	1. Jumlah sasaran pembinaan kearsipan 2. Jumlah arsip yang dipelihara dan di monev 3. Jumlah pengolah kearsipan yang mengikuti bimtek 4. Jumlah pelaksanaan akusisi arsip OPD	19 kecamatan 132 box 38 orang 1 OPD

1	2	3	4
C.	URUSAN PILIHAN		
I.	BIDANG PERIKANAN		
1.	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Penurunan kasus ilegal fishing dan descrutif fishing 2. Jumlah biota laut yang dilindungi 3. Jumlah pokmaswas 4. Jumlah sarana prasarana pengawasan	10 kasus 10 jenis 25 pokmaswas 2 unit kendaraan roda dua
2.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Jumlah sarana prasarana penangkapan 2. Jumlah produksi tangkap 3. Jumlah benih ikan unggul dan non ikan	15 jenis 15,578 ton 2 jenis ikan tawar dan laut
3.	Menguatnya kelembagaan kelompok usaha perikanan	1. Jumlah pembakul ikan 2. Jumlah pemasar dan pengepul ikan 3. Jumlah kelompok pengolah ikan 4. Jumlah kelompok perikanan budidaya	515 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 45 kelompok
4.	Meningkatnya diversifikasi dan mutu produk olahan kelompok usaha	1. Frekuensi pembinaan 2. Jenis olahan 3. Jumlah sarana prasarana peningkatan mutu tangkapan dan olahan	16 kali 1 jenis 3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)
5.	Meningkatnya PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	Peningkatan PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	4 unit (es, tambat labuh parkir, penyewaan)

1	2	3	4
2.	BIDANG PARIWISATA		
1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	5 destinasi 35 usaha jasa
2.	Pengembangan kemitraan	1. Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	7 pelatihan
3.	Pengembangan pemasaran pariwisata	1. Pelaksanaan penguatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui media cetak, elektronik dan media lainnya 2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kabupaten/Kota 3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	1 media 2 kegiatan 1 frekuensi
4.	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1. Pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1 1

1	2	3	4
3.	BIDANG PERTANIAN		
1.	Meningkatnya kapasitas produksi, produktifitas dan mutu produk komoditas tanaman hortikultura	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan tanaman hortikultura (Ton) - Siung Bawang Merah (pengembangan LP2B) 3.500 Kg - Belanja hibah uang (mendukung pengembangam hortikultura) 20 orang	
2.	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di wilayah potensial lahan basah dan kering untuk meningkatkan produktifitas pertanian	- Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian dan ketahanan pangan - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi usaha tani 1 unit - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan)PERDA LP2B) 1 dokumen - Hibah barang kepada masyarakat (perlengkapan sumur) 1 paket - Meningkatnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan tanaman pangan - Benih - Benih padi sawah 60 kg - Benih jagung komposit 40 kg - Pupuk - Pupuk Urea 200 kg - Pupuk NPK 400 kg - Bahan pengemas / pengepak benih - Kantong plastik pengemas benih 10 kg - Kantong plastik pengepak benih 50 buah	

1	2	3	4
---	---	---	---

3.	Terwujudnya kualitas aparatur yang profesional, kelembagaan aparatur yang kokoh dan tangguh	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa penyuluh 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 3. Peningkatan sarana prasarana penyuluh pertanian : Pembangunan gedung kantor BPP dan sarana pendukung	19 BPP 15 orang 1 unit
4.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman	Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : Tersedianya obat-obatan pestisida	68 kg
4.	BIDANG ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen
2.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	1 dokumen
3.	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	1 dokumen

1	2	3	4
5.	BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	1. Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar 2. Terlaksananya kegiatan sidang tera-tera ulang peralatan UTTP setiap tahun 3. Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya 4. Jumlah organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina 5. Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya	19 kecamatan 12 jenis (19 kecamatan) 4 pasar 100% 19 kecamatan
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	Tercapainya pelayanan teknologi industri	Kelompok IKM (19 kecamatan)
D.	URUSAN PENUNJANG		
1.	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Forkopimda (kali) 2. Jumlah dokumen LKPJ Kabupaten Flores Timur yang disusun (dokumen) 3. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (kali) 4. Terlaksananya pembinaan manajemen kecamatan, monitoring pelaksanaan PATEN dan Kepamongprajaan (kecamatan)	100% 100% 100% 100%

1	2	3	4
		5. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa (kec, kel/desa)	100%
		6. Terlaksananya proses penegasan dan penetapan batas administrasi wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa (kecamatan)	100%
		7. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah Kabupaten Flores Timur (kali)	100%
		8. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi proses pembentukan dan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan (kecamatan/kelurahan)	100%
		9. Jumlah LPPD dan ILPPD Kabupaten Flores Timur yang disusun (dokumen)	100%
		10. Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang dilaksanakan (kali)	100%
		11. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Flores Timur.	100%

1	2	3	4
2.	BIDANG PENGAWASAN		
1.	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan	1. Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT 2. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	100% (1.207 obrik, 40 kali, 23 kasus) 50 LHP, 16 kali, 333 orang
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai " B"	40%
3.	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan	1. Persentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun 2. Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	1% 100%
4.	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP	75%
5.	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	20%
6.	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan professional	1. Tersedianya SDM pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional (Auditor dan P2UPD) 2. Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan	1 orang P2UPD 1 orang
7.	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP	Level 3
3.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Meningkatnya efisensi dan efektifitas pengelolaan program dan kegiatan	% capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya	97%
2.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di BPPPPD	% penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun	97%

1	2	3	4
3.	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	1. % aparatur Bapeda berpendidikan S1 dan S2 2. Jumlah aparatur Bapeda mengikuti Diklat perencanaan	80% 7 orang
4.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain RKPD Penetapan, RKPD Perubahan 2. Jumlah aplikasi sistem perencanaan yang dikelola	2 dokumen 1 aplikasi (SIPD)
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab	95%
6.	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO, PT, Lembaga Donor	14 LSM/NGO, PT, Lembaga Donor
7.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan	1. Tersedianya dokumen Evaluasi Pembangunan (Evaluasi program pembangunan tahunan)	1 dokumen
8.	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi (Buku Profil Daerah)	1 dokumen
9.	Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan	% program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan	80%
10.	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	% hasil penelitian kajian dan lain-lain	85%
4.	BIDANG KEUANGAN		
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepatwaktu, transparan dan akuntabel	1. Ketepatan waktu penetapan Perda APBD 2. Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat Tepat

1	2	3	4
		3. Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5. Rata – rata waktu penyelesaian SP2D 6. Persentase kesesuaian data rinciandan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda 7. Persentase bidang tanah yang bersertifikat 8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Tepat 2 hari 100% 80% WTP
2.	Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD	Persentase Realisasi PAD	100%
3.	Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap APBD	6,5%
5.	BIDANG KEPEGAWAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai Tugas Fungsi	1. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional 2. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	- 6 orang
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Diklat Tugas dan Fungsi dan Diklat Fungsional	1. Jumlah calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 2. Terlaksananya rapat Koordinasi tingkat kepegawaian	54 CPNS -
3.	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur	1. Jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan dan kompetensinya 2. Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi ASN dan jumlah formasi	206 jabatan 519 orang

1	2	3	4
4.	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	1. Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNSD 2. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	20 kasus 20 orang
5.	Meningkatnya jenjang pendidikan ASN sesuai kebutuhan daerah	Jumlah Mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	100 orang
6.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang cepat dan akurat	1. Jumlah PNS yang mengalami kenaikan Pangkat, Berkala, Impasing dan PMK 2. Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun 3. Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata 4. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI 5. Jumlah PNS yang memiliki Taspen, KPE dan Karis / Karsu	2.790 orang 150 orang 6.100 file 100 orang 400 kartu

Larantuka, 29 Maret 2021

BUPATI FLORES TIMUR



ANTONIUS SUBERTUS GEGE HADJON, ST



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan Prosedur Kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur; (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- i. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; dan
- j. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. Kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh ASN.
- b. Efisiensi dan efektifitas
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- c. Keselarasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.
- d. Keterukuran
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilan.
- e. Dinamis
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan *kepuasan* kepada pengguna.
- g. Kepatuhan hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan *sesuai* Peraturan Perundang-undangan.
- h. Kepastian hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subyek dan Obyek; dan
- b. Jenis SOP-AP.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah ASN.
- (2) Obyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap jenis tugas dan fungsi ASN.

BAB IV JENIS STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan manasik haji; dan
 2. Pemberian bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran.
 - b. Bagian Pemerintahan Umum:
 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur; dan
 3. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
Penyusunan Naskah Sambutan/pidato Bupati/Wakil Bupati Flores Timur.
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Pengiriman Paket Lelang;
 2. Pendistribusian Paket Lelang;
 3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 4. Pengiriman Hasil Lelang;
 5. Pengarsipan Paket Lelang;
 6. Kaji Ulang Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Barang dan Jasa;
 7. Pendaftaran Penyedia;
 8. Pengajuan Perubahan Data Penyedia;
 9. Perubahan Jadwal Lelang;
 10. Pemeriksaan Fisik Lelang; dan
 11. Penanganan Sanggah dan Pengaduan.
 - e. Bagian Hukum:
 1. Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Pembentukan Peraturan Daerah;
 3. Pembentukan Peraturan Bupati;

4. Pembentukan Keputusan Bupati;
 5. Penanganan Perkara;
 6. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa;
 7. Pembentukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 8. Penyusunan Nota Kesepahaman;
 9. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama;
 10. Penyusunan Lembaran Daerah;
 11. Penyusunan Berita Daerah; dan
 12. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
- f. Bagian Organisasi:
1. Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Flores Timur;
 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 4. Penyusunan Dokumen Informasi Jabatan Kabupaten Flores Timur;
 5. Penyusunan SOP-AP Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
 7. Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Format Identitas SOP-AP dan Bagan Alir (*Flowcharts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

SOP-AP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini karena kekhususannya, tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai SOP-AP Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

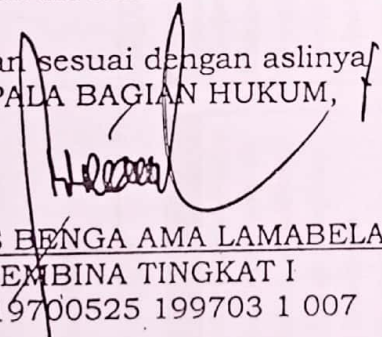
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Desember 2017

Tanggal Revisi

November 2018

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BUPATI FLORES TIMUR

Nama SOP

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten 11 Nomor 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peringatan

1. Pelaporan LKIP memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman LKIP ke Provinsi, Kemenpan dan RB, Kemendagri dan Bappenas

Kualifikasi Pelaksana

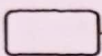
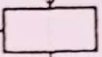
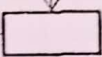
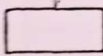
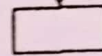
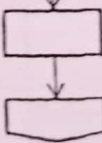
1. Sarjana Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Hukum
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Peraturan Perundangan-undangan terkait, Lembar Kerja/ Rencana Kerja

Pencatatan & Pendataan

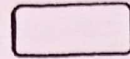
1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy
2. Pada proses penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Bagian Organisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tim Sekretariat	Tim Penyusun LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur					SK Bupati	15 menit	SK Bupati	Pembentukan Tim dengan SK Bupati
2	Mengonsep surat untuk dikirim kepada SKPD dalam rangka permintaan data kinerja dan Laporan Kinerja SKPD					Konsep Surat Keluar	10 menit	Konsep Surat Keluar	Surat dikonsep Kasubag
3	Mengoreksi surat untuk yang dikonsep Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Konsep Surat Keluar	5 menit	Konsep Surat Keluar	Surat telah dikoreksi Kabag
4	Mengetik surat, mengagendakan dan mendistribusikan surat kepada SKPD dan Tim Penyusun dalam rangka permintaan LKIP SKPD serta Rapat awal penyusunan LKIP					Surat Keluar	30 menit	Surat Keluar	Surat siap didistribusi ke SKPD dan Tim Penyusun
5	Memberi petunjuk penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja dan Staf Bagian Organisasi					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	15 Menit	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
6	Memberikan pelayanan kepada SKPD terkait konsultasi penyusunan Laporan Kinerja SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
7	Menerima dan menghimpun dokumen LKIP dari semua SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten

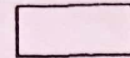
8	Menyusun draf dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Laporan Kinerja SKPD				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyusunan Draf awal LKIP Kabupaten Flores Timur
9	Mengoreksi draf awal dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama TIM Penyusun LKIP Kabupaten Flores Timur				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah dikoreksi
10	Melaksanakan proses penyempurnaan dan perbaikan atas draf LKIP antara lain: Pembahasan terkait finalisasi penyusunan dan rencana kerja TIM, Menganalisa RPJMD dan RENSTRA SKPD, Menyempurnakan draf awal LKIP				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah diperbaiki dan disempurnakan
11	Mengirim dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Inspektorat Kabupaten untuk direview				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur siap direview
12	Melakukan perbaikan/finalisasi dokumen LKIP sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Flores Timur				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Finalisasi Dokumen LKIP Kab Flores Timur
13	Mengetik surat pengantar penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur di tingkat Provinsi dan Pusat setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Flores Timur				Surat Pengantar Penyampaian LKIP	15 Menit	Surat Pengantar Penyampaian LKIP	Surat Pengantar Penyampaian LKIP di tingkat Provinsi dan Kementerian
14	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	4 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Provinsi
15	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas RI di Jakarta				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	5 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Pusat

KETERANGAN SIMBOL FLOWCHARTS:

1. Simbol Kapsul



2. Simbol Kotak



3. Simbol Belah Ketupat



4. Simbol Segilima



5. Simbol AnakPanah



Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekutif

Kegiatan pengambilan keputusan

Pindah Halaman

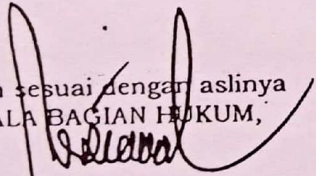
Alur Proses

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007